

## BAB II

### ANCAMAN UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF KOREA SELATAN

#### **2.1 Pasang Surut Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara: Program Nuklir Awal Korea Utara, Uji Coba Nuklir Korea Utara, Konflik di Semenanjung Korea, dan Sanksi serta Respon Korea Selatan dan Internasional terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara (1984-2022)**

Program nuklir Korea Utara memiliki akar sejarah yang panjang sejak tahun 1950-an ketika negara tersebut mulai melakukan penelitian nuklir. Meskipun kegiatan awalnya bersifat terbatas, pada tahun 1970-an Korea Utara mulai mengembangkan program nuklir secara serius. Pada 1974, Korea Utara bergabung dengan Badan Tenaga Atom Internasional/ *International Atomic Energy Agency* (IAEA), dan dari 1975 hingga 1979 mengirim ilmuwan ke kantor pusat IAEA di Jenewa untuk mempelajari cara merancang reaktor nuklir. Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan Korea Utara dalam membangun kemampuan nuklirnya.

Pada tahun 1984, Korea Utara menguji rudal balistik jarak pendek yang dikenal dengan nama "Scud-B", yang merupakan versi modifikasi dari rudal *Scud-B* buatan Soviet. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 300 km dan dapat membawa hulu ledak konvensional.<sup>53</sup> Kemudian pada Juli 1985, Korea Utara meratifikasi

---

<sup>53</sup> The Korea Times. (2017, September 3). *Chronology of North Korean missile development*. <https://www.koreatimes.co.kr/amp/foreignaffairs/northkorea/20170903/chronology-of-north-korean-missile-development> (diakses pada 20 April 2025 pukul 20:19 WIB)

Traktat Nonproliferasi Nuklir/*Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), namun keputusannya didorong oleh tekanan Uni Soviet sebagai syarat mendapatkan bantuan teknologi nuklir.<sup>54</sup> Meskipun demikian, komitmen Korea Utara terhadap perjanjian tersebut patut dipertanyakan karena sejak tahun 1989, citra satelit yang diperoleh oleh Amerika Serikat menunjukkan adanya aktivitas konstruksi baru di kompleks nuklir Yongbyon di Korea Utara. Namun demikian, Korea Utara belum mengizinkan inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan inspeksi fasilitas nuklirnya, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian NPT.

Pada tanggal 31 Juli 1991, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani *Strategic Arms Reduction Treaty* (START), sebuah perjanjian yang membatasi penempatan senjata nuklir di luar negeri. Sebagai kelanjutan dari kesepakatan ini, pada 27 September 1991, Presiden George H.W. Bush mengumumkan penarikan sepihak seluruh senjata nuklir taktis Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri, termasuk sekitar 100 senjata nuklir yang berbasis di Korea Selatan. Sejak saat itu, tidak ada lagi senjata nuklir yang ditempatkan di wilayah Korea Selatan.<sup>55</sup> Menanggapi langkah tersebut, pada 8 November 1991, Presiden Korea Selatan Roh Tae Woo menyampaikan Deklarasi Denuklirisasi Semenanjung Korea, yang menyatakan bahwa Korea Selatan tidak akan memproduksi, memiliki, menyimpan,

---

<sup>54</sup> Szalontai, B., & Radchenko, S. 2025. *North Korea's Efforts to Acquire Nuclear Technology and Nuclear Weapons: Evidence from Russian and Hungarian Archives*. <http://www.cwihp.org>, hal. 21.

<sup>55</sup> Columbia Law School Center for Korean Legal Studies. North Korea's nuclear program: A history. Columbia University. <https://kls.law.columbia.edu/content/north-koreas-nuclear-program-history> (diakses pada 20 April 2025 pukul 20:19 WIB)

menempatkan, ataupun menggunakan senjata nuklir.<sup>56</sup> Deklarasi ini juga melarang Korea Selatan secara sepihak memiliki fasilitas pemrosesan ulang atau pengayaan uranium. Komitmen ini secara langsung memenuhi seluruh prasyarat yang diajukan oleh Korea Utara agar negara tersebut mengizinkan inspeksi dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA) terhadap fasilitas nuklir yang dimilikinya.

Pada 21 Januari 1992, Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani *Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula*, dimana kedua pihak sepakat untuk tidak menguji, memproduksi, menerima, menyimpan, menempatkan, atau menggunakan senjata nuklir. Mereka juga berkomitmen untuk menggunakan energi nuklir hanya untuk tujuan damai dan tidak memiliki fasilitas pemrosesan ulang atau pengayaan uranium. Sebagai mekanisme verifikasi, disepakati pula pelaksanaan inspeksi timbal balik (*reciprocal inspections*) sebagai bentuk mekanisme verifikasi. Untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut, pada Maret 1992, dibentuk *Joint Nuclear Control Commission* (JNCC). Sementara itu, pada 30 Januari 1992, Korea Utara setelah enam tahun menandatangani NPT akhirnya menyetujui perjanjian inspeksi dengan IAEA, yang memungkinkan verifikasi terhadap tujuh situs nuklir di Yongbyon. Ketegangan meningkat pada 12 Maret 1993, saat IAEA menemukan bahwa Korea Utara telah memproses ulang plutonium pada 1989, 1990, dan 1991. Ketika IAEA meminta *special inspection* ke dua lokasi limbah, Korea Utara menolak, dan pada 19 Maret 1993, mengumumkan pengunduran diri dari NPT berdasarkan Pasal X. Tak lama kemudian, pada 29 Mei

---

<sup>56</sup> Columbia Law School Center for Korean Legal Studies. North Korea's nuclear program: A history. Columbia University. <https://kls.law.columbia.edu/content/north-koreas-nuclear-program-history> (diakses pada 20 April 2025 pukul 20:19 WIB)

1993, Korea Utara melakukan uji coba rudal Nodong-1 ke arah Laut Jepang, yang memicu kekhawatiran di Jepang karena rudal tersebut mampu menjangkau beberapa kota besar di wilayahnya.

Hingga pada 12 Maret 1993, Korea Utara mengumumkan niatnya untuk keluar dari NPT setelah IAEA meminta akses ke dua lokasi tambahan. Ketegangan ini sempat diredakan melalui negosiasi dengan Amerika Serikat, menghasilkan penangguhan penarikan diri Korea Utara dari NPT dan janji untuk kembali bekerja sama dengan IAEA. Namun, hingga awal 1994, kerjasama tetap tidak stabil dan bahkan sempat memicu ancaman aksi militer dari Amerika Serikat.

Situasi mereda setelah penandatanganan *Agreed Framework* antara Korea Utara dan Amerika Serikat pada Oktober 1994. Dalam perjanjian tersebut, Korea Utara setuju untuk membekukan dan kemudian membongkar reaktor nuklirnya di Yongbyon, dengan imbalan pembangunan reaktor air ringan dan pasokan minyak dari pihak internasional. Namun, perjanjian ini juga menghadapi berbagai hambatan, termasuk penundaan pembangunan reaktor dan keterlambatan pengiriman bantuan energi.<sup>57</sup>

Ketegangan kembali meningkat pada Agustus 1998 saat Korea Utara meluncurkan Taepodong-1, yang melintasi Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik. Korea Utara menyatakan bahwa itu bagian dari program luar angkasa sipil, namun para analis menilai peluncuran tersebut memiliki dimensi militer.

---

<sup>57</sup> Council on Foreign Relations. Timeline North Korean Nuclear Negotiations. 2025. <https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations> (diakses pada 14 Mei 2025 pukul 01:06 wib)

Selanjutnya pada tahun 2002, krisis kembali muncul ketika Korea Utara mengakui bahwa mereka telah menjalankan program pengayaan uranium rahasia. Hal ini memicu pembatalan *Agreed Framework* dan akhirnya pada 10 Januari 2003, Korea Utara secara resmi menarik diri dari NPT, menjadi satu-satunya negara yang melakukannya. Setelah itu, Korea Utara mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya dan pada April 2003, secara terbuka mengklaim telah memiliki senjata nuklir.<sup>58</sup>

Sebagai respons diplomatik, Korea Selatan bersama dengan inisiasi Amerika Serikat dan China serta keterlibatan Rusia meluncurkan *Six Party Talks*<sup>59</sup> pada 9 Agustus 2003. Pertemuan *Six Party Talks* bertujuan untuk menekan nuklir Korea Utara. Korea Utara mengusulkan pendekatan bertahap dengan syarat Amerika Serikat menandatangani "*non-aggression treaty*" dan membangun hubungan diplomatik normal serta memberi Korea Utara bantuan ekonomi. Sementara itu, Korea Utara berjanji membongkar fasilitas nuklirnya dan menghentikan uji coba rudal nuklir dan ekspor rudal nuklir. Meskipun pembicaraan awal tidak mencapai terobosan signifikan, kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut, di mana Korea Utara secara eksplisit membantah adanya program pengayaan uranium. Fase awal dari *the Six Party Talks* menunjukkan sedikit

---

<sup>58</sup> Columbia Law School Center for Korean Legal Studies. North Korea's nuclear program: A history. Columbia University. <https://kls.law.columbia.edu/content/north-koreas-nuclear-program-history> (diakses pada 20 April 2025 pukul 20:19 WIB)

<sup>59</sup> *Six Party Talks* adalah pertemuan multilateral enam negara di sekitar Semenanjung Korea yang pertama kali diadakan pada tanggal 27 Agustus 2003 untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Negara-negara yang berpartisipasi dalam Perundingan Enam Pihak adalah Korea Selatan, Federasi Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Utara, dan China.

fleksibilitas dari pihak Washington maupun Pyongyang, dengan kemajuan yang lambat untuk mencapai hasil.<sup>60</sup>

Kemudian pada 19 September 2005, tercapai sebuah kesepakatan penting dalam perundingan *Six Party Talks*, yang dikenal sebagai *the adoption of the September 19 Beijing Joint Statement*, Pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Roh Moo Hyun menyambut pencapaian ini sebagai salah satu keberhasilan diplomatik terbesar selama masa kepemimpinannya. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah konkret menuju penyelesaian damai atas masalah nuklir Korea Utara yang telah lama menjadi sumber ketegangan di kawasan. Dalam pernyataan tersebut, Korea Utara menyatakan kesediaannya untuk menghentikan seluruh program senjata nuklirnya, kembali menjadi anggota *Non-Proliferation Treaty* (NPT), dan mengizinkan pengawasan internasional melalui *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Selain itu, seluruh pihak yang terlibat juga menegaskan pentingnya kembali menerapkan *the South-North Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula 1992* yang sebelumnya telah disepakati oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Sebagai bagian dari kesepakatan, disepakati pula bahwa isu pemberian reaktor nuklir air ringan kepada Korea Utara akan dibahas lebih lanjut di waktu yang tepat. Ini menunjukkan adanya itikad untuk memenuhi kebutuhan energi Korea Utara melalui cara damai dan diawasi secara internasional.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Shelton, G. (2009). The Six-Party Talks and Denuclearisation. In *KOREA & SOUTH AFRICA: Building a strategic partnership*. Institute for Global Dialogue. hal.17

<sup>61</sup> Moon, C. (2008). DIPLOMACY OF DEFIANCE AND FACILITATION: THE SIX PARTY TALKS AND THE ROH MOO HYUN GOVERNMENT. *Asian Perspective*, 32(4), hal.91.  
<http://www.jstor.org/stable/42704654> (diakses pada 10 Mei 2025, pukul 03:28 wib)

Namun, sebulan setelah kesepakatan tersebut, muncul hambatan ketika *U.S. Treasury Department* memberlakukan sanksi keuangan terhadap Banco Delta Asia di Makau, yang di melakukan pencucian uang untuk Korea Utara. Pemerintah Makau kemudian membekukan sekitar 50 rekening milik Pyongyang, yang memicu kemarahan Korea Utara. Perundingan *Six Party Talks* kembali gagal. Ketegangan kembali memuncak yang terjadi pada 9 Oktober 2006 ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya.<sup>62</sup>

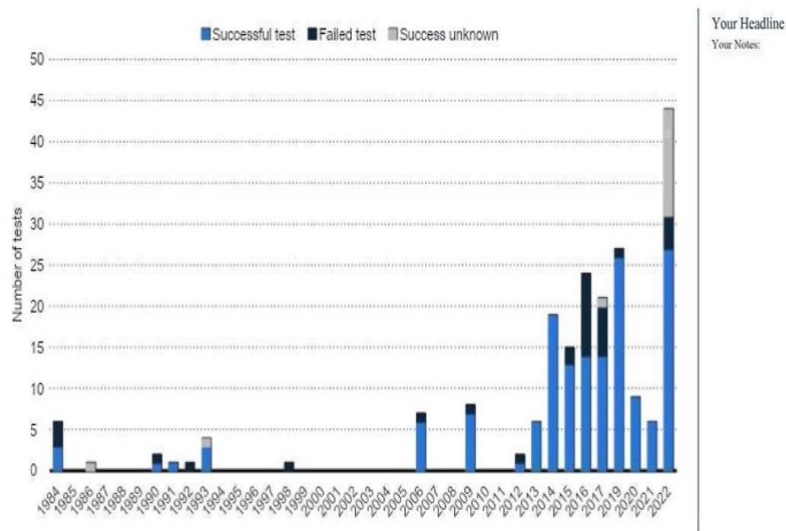
Uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sejak 1984 selalu senantiasa memicu ketegangan khususnya terhadap Korea Selatan, Jepang, Tiongkok bahkan hingga ke ranah global. Meskipun tidak seluruh uji coba tersebut berhasil secara teknis, setiap percobaan tetap memberikan dampak signifikan, baik dalam bentuk reaksi diplomatik, peningkatan kesiagaan militer, maupun perubahan dinamika regional.

---

<sup>62</sup> Council on Foreign Relations. (2023, 16 Agustus). *Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program*. Diakses pada 9 Mei 2025, dari <https://www.cfr.org/backgrounder/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program>

**Grafik 2.1 Number of North Korea Missile Tests (1984-2022)<sup>63</sup>**

Number of ballistic missile tests conducted by North Korea from 1984 to June 2022, by result  
 Timeline of successful and failed ballistic missile tests by North Korea 1984-2022



Gejolak dan ketegangan regional hingga global yang ditimbulkan oleh uji coba rudal dan nuklir Korea Utara menuai sanksi melalui Korea Selatan hingga dunia internasional termasuk Dewan Keamanan PBB.

**Tabel 2.1 Timeline Ketegangan Konflik, Uji Coba Nuklir Korea Utara dan Sanksi serta Respon oleh Korea Selatan, Dewan Keamanan PBB, dan Internasional**

No	Peristiwa	Penjelasan Peristiwa	Resolusi Dewan Keamanan PBB, Korea Selatan, dan Internasional	Isi Sanksi / Resolusi Respon	Tanggal Resolusi

<sup>63</sup> Diakses dari Statista pada 26 Februari 2024 pukul 16:46 WIB

1	Uji coba rudal Taepodong-1 (31 Agustus 1998)	Korea Utara meluncurkan rudal tiga tahap yang mereka sebut satelit Kwangmyongsong-1. Tahap ketiga rudal tersebut melintas di atas wilayah Jepang (prefektur Aomori) sebelum jatuh di Samudra Pasifik. Ini merupakan rudal Korea Utara dengan jangkauan terpanjang saat itu (~1,600-2,000 km), menunjukkan lompatan teknologi yang signifikan dan kemampuan potensial untuk menargetkan wilayah yang jauh, termasuk Jepang dan pangkalan militer AS di Guam.	Presidential Statement S/PRST/1998/28	Jepang mengutuk keras, menangguk bantuan pangan dan kontribusi finansial untuk KEDO (organisasi pembangunan reaktor nuklir alternatif). AS menyatakan "keprihatinan serius". Korsel (pemerintahan Kim Dae-jung) memilih untuk tidak mengutuk secara keras untuk menjaga kebijakan <i>Sunshine Policy</i> .	15 September 1998
---	--	---	---------------------------------------	--	-------------------

2	Uji coba rudal Taepodong-2 (5 Juli 2006)	Peluncuran uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) generasi baru Korea Utara, Taepodong-2, bersama dengan enam rudal jarak pendek dan menengah. Rudal utama diperkirakan mampu menjangkau Alaska atau Hawaii, tetapi gagal dan meledak kurang dari satu menit setelah diluncurkan. Meski gagal, peluncuran ini dianggap provokatif dan langsung menguji posisi internasional, terutama AS dan Jepang.	Resolusi 1695	Mengusulkan kepada negara-negara anggota PBB untuk memberlakukan larangan global terhadap pengiriman aset yang berhubungan dengan pengembangan rudal ke Korea Utara. Korea Selatan menghentikan bantuan beras dan pupuk. tindakan tegas di PBB.	15 Juli 2006
---	--	--	---------------	---	--------------

3	Uji Coba Nuklir Pertama Korea Utara (9 Oktober 2006)	Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir bawah tanah pertamanya di lokasi Punggye-ri. Yield (kekuatan ledakan) diperkirakan kecil (<1 kiloton TNT) dan mungkin merupakan uji coba yang "gagal sebagian". Namun, peristiwa ini secara dramatis mengubah status quo keamanan di Semenanjung Korea, membuktikan bahwa Korut telah bergabung dengan "klub nuklir" dan secara langsung melanggar perjanjian non-proliferasi.	Resolusi 1718	Melarang uji coba rudal balistik oleh Korea Utara, memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan, membentuk Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB yang secara khusus menangani isu Korea Utara, serta menghentikan segala bentuk bantuan kepada negara tersebut. Korea Selatan mengutuk keras dan mengumumkan partisipasi penuh dalam PSI ( <i>Proliferation Security Initiative</i> ).	14 Oktober 2006
---	--	--	---------------	--	-----------------

4	Uji Coba Nuklir Kedua Korea Utara (25 Mei 2009)	Uji coba nuklir kedua, juga di Punggye-ri. Yield yang jauh lebih besar diperkirakan antara 2-7 kiloton TNT, menunjukkan peningkatan desain dan teknologi nuklir Korut. Dilakukan tak lama setelah DK PBB mengutuk peluncuran rudal jarak jauh lainnya (April 2009), menandakan penolakan Korut terhadap tekanan internasional.	Resolusi 1874	Pembatasan terhadap transaksi dan transfer teknologi yang berkaitan dengan persenjataan, penerapan sanksi keuangan yang ditujukan pada program senjata pemusnah massal/ <i>Weapon Mass Destruction (WMD)</i> , serta perluasan cakupan dan efektivitas sanksi yang diarahkan kepada Korea Utara.	12 Juni 2009
5	Insiden Penenggelaman Kapal ROKS Cheonan (26 Mar 2010)	Kapal korban ROKS Cheonan tenggelam di Yellow Sea, menewaskan 46 pelaut. Investigasi internasional menyimpulkan torpedo Korea Utara sebagai penyebab. Spekulasi bahwa tenggelamnya kapal tersebut merupakan akibat dari	Langkah 5.24 (5.24 Measures)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghentian seluruh perdagangan antar-Korea</li> <li>2. Larangan kapal Korea Utara memasuki perairan Korea Selatan</li> <li>3. Larangan kunjungan warga Korea Selatan ke Korea Utara serta pembatasan kontak</li> </ol>	

	<p>tindakan Korea Utara sudah merebak sejak awal. Aktivitas kapal selam yang mencurigakan di Nampo merupakan salah satu faktor penyebabnya, begitu pula sejarah serangan mendadak dan brutal Korea Utara terhadap pasukan Korea Selatan. Ranjau yang dipasang oleh kapal selam, atau serangan/tembakan torpedo, dianggap sebagai penyebab yang paling mungkin.<sup>64</sup></p>		<p>4. Pelarangan investasi baru dan ekspansi bisnis yang ada di Korea Utara</p> <p>5. Penangguhan seluruh proyek bantuan kecuali untuk bantuan kemanusiaan.</p>	
--	---	--	---	--

<sup>64</sup> Mizokami, K. (2020, January 21). *Why did North Korea sink the South Korean warship Cheonan in 2010?* The National Interest. Retrieved August 25, 2025, from The National Interest website: <https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-did-north-korea-sink-south-korean-warship-cheonan-2010-115551>

6	<i>Unha-3 expendable carrier rocket launch</i> (12 Desember 2012)	Korea Utara meluncurkan roket Unha-3 yang diklaim membawa satelit observasi bumi Kwangmyongsong-3 Unit 2. Namun, masyarakat internasional menilainya sebagai uji coba terselubung untuk teknologi ICBM Taepodong-2, karena teknologi peluncuran satelit dan rudal balistik dapat dipertukarkan. Roket ini berhasil mencapai orbit, menunjukkan kemajuan teknis.	Resolusi 2087	Memperkuat sanksi yang telah berlaku dengan memberikan otoritas kepada negara-negara untuk menyita dan memeriksa pengiriman yang dicurigai terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan militer yang melibatkan Korea Utara, baik dalam maupun luar negeri.	22 Januari 2013
7	Uji Coba Nuklir Ketiga Korea Utara (12 Februari 2013)	Uji coba nuklir ketiga, menggunakan perangkat yang diperkirakan lebih kecil namun lebih kuat dengan yield sekitar 6-9 kiloton TNT. Ini adalah uji coba pertama di masa kepemimpinan	Resolusi 2094	Pelaksanaan inspeksi wajib terhadap kapal dan kargo yang dicurigai, peningkatan pemantauan terhadap aktivitas diplomat Korea Utara, serta penanggulangan seluruh transaksi	7 Maret 2013

		<p>Kim Jong-un dan menegaskan komitmen rezim baru terhadap program nuklir. Uji coba ini menggunakan bahan fisil uranium yang diperkaya, yang jika benar, menunjukkan diversifikasi dan peningkatan stok bahan baku nuklir Korut.</p>		<p>keuangan yang berkaitan dengan program pengembangan rudal nuklir dan balistik.</p>	
8	<p>Uji coba nuklir ke-4 oleh Korea Utara (6 Jan 2016)</p>	<p>Korea Utara mengklaim telah melakukan uji coba nuklir pertamanya dengan bom hidrogen (termonuklir). Analisis seismik menunjukkan yield sekitar 6-9 kt, yang dianggap terlalu kecil untuk senjata termonuklir sepenuhnya, tetapi mungkin merupakan desain "booster" (<i>Teller-Ulam</i>) tahap awal atau</p>	<p>Langkah 3.8 (3.8 Measures)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan subjek sanksi</li> <li>2. Larangan kapal asing yang mengunjungi pelabuhan Korea Utara dalam 180 hari memasuki pelabuhan domestik</li> <li>3. Pelarangan kapal berbendera Korea Utara masuk ke pelabuhan Korea Selatan</li> <li>4. Peningkatan kontrol ekspor-impor</li> <li>5. Penerbitan daftar</li> </ol>	<p>8 Maret 2016</p>

		senjata fission yang ditingkatkan ( <i>boosted fission</i> ). Klaim H-bomb menimbulkan kecemasan internasional yang signifikan.		pantauan untuk barang-barang terkait nuklir dan misil	
9	Uji Coba Nuklir Keempat Korea Utara (16 Januari 2016)	Ini adalah peristiwa yang sama dengan baris 8. Resolusi PBB (2270) adalah respons terhadap uji coba 6 Jan ini. Resolusi ini disusun setelah negosiasi intensif, terutama dengan China, sebagai tanggapan atas uji coba nuklir ke-4 dan peluncuran satelit Februari 2016.	Resolusi 2270	Penerapan sanksi yang lebih ketat terhadap Korea Utara, termasuk pembekuan aset, kewajiban pengeledahan atas seluruh barang dalam kapal, serta perluasan larangan ekspor terhadap komoditas seperti batu bara dan bijih besi.	2 Maret 2016

10	Uji Coba Nuklir Kelima Korea Utara (9 September 2016)	Uji coba nuklir terbesar pada saat itu, dengan yield diperkirakan 10-20 kt. Korut menyatakan telah menguji hulu ledak nuklir yang dapat dipasang pada rudal balistik. Ukuran ledakan yang lebih besar menunjukkan kemajuan dalam miniaturisasi dan efisiensi desain senjata nuklir mereka, mendekati kemampuan senjata operasional.	Resolusi 2321	Pembatasan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelarangan tambahan terhadap ekspor logam seperti perak, tembaga, dan seng, serta larangan perdagangan dan penjualan patung yang berasal dari Korea Utara.	30 November 2016
11	<i>Repeated Launches of Short-Range Missiles</i> (2017)	Sepanjang 2017, Korut melakukan serangkaian peluncuran rudal jarak pendek dan menengah (seperti Scud, KN-15, KN-17) yang meningkatkan kemampuan dan kesiapan tempur militernya. Rudal-rudal ini dirancang	Resolusi 2356	Penambahan sanksi terhadap empat institusi dan empat belas individu, termasuk Koryo Bank dan sejumlah tokoh penting dalam struktur kepemimpinan Partai Pekerja Korea Utara.	2 Juni 2017

		<p>untuk mengatasi pertahanan misil (seperti THAAD) dan menargetkan pangkalan militer AS di Korsel dan Jepang, menimbulkan ancaman langsung dan taktis.</p>			
12	<p>ICBM-class missile test launch (4 Juli 2017)</p>	<p>Korea Utara untuk pertama kalinya berhasil menguji rudal balistik antarbenua (ICBM), Hwasong-14. Rudal tersebut terbang selama sekitar 37 menit dan mencapai ketinggian lebih dari 2.800 km, dengan jangkauan teoritis diperkirakan mampu mencapai Alaska. Ini merupakan pencapaian teknis utama yang secara langsung mengancam daratan Amerika Serikat.</p>	<p>Resolusi 2371</p>	<p>Penguatan sanksi yang telah berlaku dengan memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk menyita dan memeriksa pengiriman yang dicurigai terkait kegiatan litbang militer, baik menuju maupun keluar dari Korea Utara.</p>	<p>5 Agustus 2017</p>

13	Uji Coba Nuklir Keenam Korea Utara (3 September 2017)	Uji coba nuklir terbesar dan paling kuat yang dilakukan Korea Utara. Yield seismik diperkirakan 100+ kiloton TNT, dikonfirmasi sebagai uji coba senjata termonuklir (bom hidrogen) yang dapat dipasang pada ICBM. Korea Utara menyebutnya " <i>ICBM hydrogen bomb</i> ". Peristiwa ini menyempurnakan status Korut sebagai negara nuklir dengan hulu ledak yang kuat.	Resolusi 2375	Pembatasan signifikan atas sektor energi dan ekonomi, mencakup pembatasan impor minyak mentah dan produk minyak olahan, larangan atas usaha patungan, ekspor tekstil, serta impor kondensat dan gas alam cair. Selain itu, dilarang mempekerjakan warga negara Korea Utara di luar negeri.	11 September 2017
----	---	---	---------------	--	-------------------

14	Hwasong-15 ICBM launch (28 November 2017)	Peluncuran ICBM generasi baru, Hwasong-15, yang lebih besar dan lebih powerful. Roket ini mencapai ketinggian sekitar 4.475 km dan terbang selama 53 menit, dengan jangkauan teoritis yang mampu mencapai seluruh daratan utama Amerika Serikat, termasuk Washington D.C. Ini menandai puncak dari serangkaian pengujian rudal yang sangat agresif pada tahun 2017.	Resolusi 2397	Pembatasan lebih lanjut terhadap minyak Korea Utara hingga 500.000 barel per tahun, pelarangan ekspor barang-barang strategis seperti makanan, mesin, dan peralatan listrik, serta kewajiban pemulangan pekerja Korea Utara di luar negeri dalam kurun waktu 24 bulan. Negara anggota PBB juga diberi otoritas untuk menyita dan memeriksa kapal yang terlibat dalam pengiriman minyak atau barang terlarang di wilayah perairan mereka.	22 Desember 2017
15	Uji Coba Rudal Jarak Menengah (25 Juli 2019)	Korea Utara menguji coba peluncuran dua rudal balistik jarak pendek (KN-23).	Tidak ada resolusi baru.	Militer AS dan Korea Selatan memulai latihan militer Dong Maeng selama dua minggu.	2019

16	Uji coba dua rudal balistik jarak pendek (3 Februari 2020)	Korea Utara menguji coba dua rudal balistik jarak pendek (KN-25 MLRS)	Tidak ada respon dan tidak ada resolusi	Tidak ada respon dan tidak ada resolusi	-
17	Uji Coba Rudal Balistik dari Kapal Selam (SLBM) (2021)	Korea Utara berhasil menguji rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) Pukguksong -5.	Tidak ada resolusi baru.	Korea Selatan dan AS menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan.	2021
18	Uji Coba Rudal Hipersonik (Januari 2022)	Korea Utara mengklaim telah menguji rudal hipersonik yang mampu melakukan manuver dan menghindari pertahanan rudal.	Tidak ada resolusi baru karena veto dari Tiongkok dan Rusia.	Korea Selatan (di bawah Yoon Suk Yeol) mengutuk keras dan menegaskan akan memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS.	Januari 2022

19	Uji Coba ICBM (Maret 2022)	Korea Utara menguji rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-17 yang mampu mencapai seluruh daratan AS.	Pertemuan darurat DK PBB diadakan, namun tidak ada resolusi baru karena penolakan Tiongkok dan Rusia.	Korea Selatan dan AS melakukan latihan militer gabungan darurat. Presiden Yoon Suk Yeol menegaskan komitmen untuk memperkuat deterensi.	Maret 2022
20	Peluncuran Rudal dari Kapal Selam (7 Mei 2022)	Korea Utara menembakkan rudal balistik dari kapal selam di perairan timur, menunjukkan peningkatan kemampuan kedua serangan.	Tidak ada resolusi baru.	Korea Selatan mengutuk peluncuran tersebut dan mengumumkan akan mempercepat revitalisasi <i>Three Axis Defense System</i> (TADS).	7 Mei 2022
21	Rekor Peluncuran Rudal Sepanjang 2022	Sepanjang tahun 2022, Korea Utara melakukan lebih dari 70 peluncuran rudal berbagai jenis, termasuk rudal jarak pendek,	Tidak ada resolusi baru. Sanksi sebelumnya tetap berlaku.	Korea Selatan merilis Buku Putih Pertahanan 2022 yang menegaskan revitalisasi TADS. AS dan sekutu meningkatkan latihan	2022

		menengah, dan ICBM.		militer bersama.	
--	--	------------------------	--	---------------------	--

(Sumber : Diolah dari berbagai sumber )

Dalam pidato pelantikannya, presiden Yoon Suk Yeol memberikan *statement* tentang ancaman uji coba nuklir Korea Utara terhadap Korea Selatan, dan akan mengisyaratkan sikap yang lebih keras terhadap Korea Utara atas ancaman, memperingatkan akan adanya serangan pendahuluan jika ada tanda-tanda serangan yang akan segera terjadi dan berjanji untuk memperkuat kemampuan pencegahan Korea Selatan, namun juga tidak menutup kemungkinan adanya denuklirisasi.

*“While North Korea’s nuclear weapon programs are a threat not only to our security and that of Northeast Asia, the door to dialogue will remain open so that we can peacefully resolve this threat.....”*<sup>65</sup>

Namun, terjadi peristiwa serangan rudal Korea Utara yang terjadi pada 2 November 2022 mendarat sangat dekat dengan wilayah Korea Selatan, di mana sebuah rudal balistik jarak pendek melintasi Garis Batas Utara (NLL) untuk pertama kalinya, memicu peringatan serangan udara dan perintah mengungsi ke bunker bagi warga di Pulau Ulleungdo, menunjukkan betapa dekat dan nyata ancaman tersebut terhadap keselamatan sipil. Hal itu secara tegas digambarkan oleh Presiden Yoon Suk-yeol sebagai "pelanggaran wilayah secara *de facto*" dan "invasi teritorial yang efektif", hal itu menandai eskalasi ancaman langsung yang belum

---

<sup>65</sup> NBC News, *South Korea’s new president says North poses threats but door open for talks*. 10 Mei 2022, diakses pada 22 Desember 2025, di <https://www.nbcnews.com/news/world/south-korea-yoon-suk-yeol-inaugurated-rcna28055>.

pernah terjadi sejak Perang Korea berakhir, serta berpotensi menimbulkan konflik bersenjata.<sup>66</sup> Korea Selatan memberlakukan sanksi otonom sebagai respons terhadap provokasi militer langsung dari Korea Utara, termasuk tenggelamnya kapal perang ROKS Cheonan milik Korea Selatan dan dua uji coba nuklir. Korea Selatan memperkuat sanksi ini, khususnya dalam sektor keamanan siber dan pengawasan, guna menciptakan lingkungan strategis yang menambah tekanan internasional terhadap Korea Utara seiring dengan sanksi Dewan Keamanan PBB. Tujuan utamanya adalah mendorong Korea Utara agar menghentikan ambisi nuklirnya. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah tenggelamnya kapal patroli PCC-772 Cheonan akibat serangan torpedo Korea Utara pada tahun 2010 yang menewaskan 46 awak kapal. Akar konflik maritim ini berasal dari berakhirnya Perang Korea pada 1953, yang menghasilkan garis batas darat melalui Garis Demarkasi Militer (MDL) dan Zona Demiliterisasi (DMZ), namun tanpa kesepakatan mengenai batas wilayah laut. Atas kekhawatiran bahwa Presiden Korea Selatan saat itu, Syngman Rhee, yang menolak perjanjian gencatan senjata, dapat melancarkan serangan laut ke Korea Utara, Amerika Serikat secara sepihak menetapkan Garis Batas Utara (*Northern Limit Line/NLL*). Lima pulau, termasuk Yeonpyeong, berada di selatan garis ini. Korea Utara menolak legitimasi NLL karena membatasi akses mereka ke wilayah perikanan penting, namun karena keterbatasan kekuatan laut, mereka sempat menerimanya secara *de facto*. Sejak 1990-an, Korea Utara mulai menantang garis tersebut, menetapkan batas laut

---

<sup>66</sup> Gulf Times, *N. Korea fires more than 10 missiles, one close to S. Korea*. 2 November 2022, diakses pada 22 Desember 2025, di <https://www.gulf-times.com/story/728028/S-Korean-President-condemns-N-Korea-s-latest-missi>.

versinya sendiri, dan melintasi NLL secara sengaja, yang menyebabkan bentrokan mematikan pada tahun 1999, 2002, dan 2009. Ketegangan memuncak pada 23 November 2010, ketika DPRK menembakkan puluhan peluru artileri ke Pulau Yeonpyeong, menewaskan dua tentara dan dua warga sipil, menyusul latihan militer rutin Korea Selatan yang dianggap Korea Utara melanggar wilayahnya.<sup>67</sup>

Penting untuk memahami bahwa dari terjadinya konflik di Semenanjung Korea, tidak selalu Korea Utara yang melakukan ancaman terlebih dahulu, tetapi juga Korea Selatan dianggap memicu konflik karena telah melakukan latihan bersama di semenanjung korea (AS-ROK). Sehingga menurut penulis, di satu sisi, dalam perspektif Korea Selatan, Korea Utara sering melakukan uji coba nuklir tersebut sebagai hal nya disebut dengan diplomasi koersif. Diplomasi koersif sendiri dikenal sebagai pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara melalui ancaman, sanksi bahkan dalam bentuk kekerasan, dengan maksud mengubah sikap negara yang bersangkutan. Diplomasi koersif sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Alexander L. George pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul "The Limits of Coercive Diplomacy" pada tahun 1971.<sup>68</sup> Konsep diplomasi koersif adalah konsep yang berasal dari diplomasi kekerasan yang diperkenalkan oleh Thomas C. Schelling dalam bukunya "Arms and Influence" pada tahun 1966, terutama melalui konsep paksaan. Compellence adalah strategi pemaksaan dengan bentuk ancaman yang dilakukan dengan kekerasan atau

---

<sup>67</sup> BBC News, *Why North Korea's attack on the South Korean island of Yeonpyeong still matters*. 16 Desember 2019, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-50808326> pada 14 Mei 2025.

<sup>68</sup> George, A.L. (1971). *The Limits Of Coercive Diplomacy*.

kekerasan secara terbatas namun efisien, guna meningkatkan kredibilitas ancaman itu sendiri. George mengatakan, diplomasi koersif memiliki dua tujuan utama, yaitu menghentikan atau membatalkan tindakan berbahaya yang telah dilakukan oleh negara.<sup>69</sup> Diplomasi paksa juga berbeda dari *deterrence*. *Deterrence* menggunakan ancaman untuk mencegah lawan melakukan tindakan yang tidak diinginkan, sementara diplomasi paksa adalah respons terhadap tindakan yang telah dilakukan. Diplomasi koersif menjadi alasan utama Korea Utara dalam mempertahankan nuklirnya, serta untuk melindungi keamanan negaranya, selain itu juga sebagai senjata untuk menghentikan tindakan Korea Selatan. Maka, dengan cara diplomasi koersifnya ini pulalah, Korea Utara mengancam balik Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya termasuk Korea Selatan.

Latihan militer gabungan Korea Selatan-AS yang rutin dilakukan di Semenanjung Korea juga dipersepsikan Pyongyang sebagai ancaman eksistensial yang memicu respons balasan. Persepsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa latihan bersama sering mensimulasikan skenario ancaman nyata yang dianggap sebagai provokasi oleh Korea Utara. Sebagai respons terhadap tindakan koersif Korea Utara, Korea Selatan mengembangkan media *deterrence*. Bagi Korea Utara, program nuklirnya merupakan cara diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat dan sekutunya mengarah pada langkah negosiasi. Seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, Korea Utara pun menggunakan

---

<sup>69</sup> SCHELLING, T. C. (1966). *Arms and Influence*. Yale University Press.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctt5vm52s>

teknologi nuklir yang dimilikinya sebagai sebuah bentuk diplomasi koersif dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya.<sup>70</sup>

Dalam dinamika kekuatan di Semenanjung Korea, Korea Utara terus berupaya menegaskan klaimnya atas wilayah maritim yang disengketakan dengan menggunakan taktik provokatif seperti serangan artileri mendadak, peluncuran rudal, dan pelanggaran wilayah laut, untuk memperkuat kontrol domestik dan menantang dominasi militer Korea Selatan serta Amerika Serikat. Sebaliknya, Korea Selatan tetap berkomitmen mempertahankan integritas wilayahnya, menjaga kehadiran militer yang kuat di pulau-pulau dekat perbatasan, khususnya Yeonpyeong, dan memastikan keselamatan warga sipil. Strategi pertahanan Korea Selatan mengedepankan respons cepat terhadap provokasi sembari menghindari eskalasi konflik, serta memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat sebagai bentuk penangkal tambahan, meskipun aliansi tersebut memberikan keunggulan militer bagi Korea Selatan, kemampuan rudal Korea Utara tetap menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kawasan. Dukungan implisit dari Tiongkok terutama terhadap Korea Utara juga menambah kompleksitas dalam keseimbangan kekuatan regional.<sup>71</sup>

Ketegangan di Semenanjung Korea terus meningkat ditambah dengan rangkaian uji coba nuklir, pengembangan rudal, dan tindakan provokatif Korea Utara yang konsisten.

---

<sup>70</sup> Ahmad, A. (2020). *PERAN NUKLIR KOREA UTARA SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL* Oleh: Andi Purwono1 dan Ahmad Saifuddin Zuhri2. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4yjpg>

<sup>71</sup> Global Eye. (2025, January 25). *Yeonpyeong Island and Korean conflict*. Global Eye Intelligence. Diakses pada 14 Mei 2025, dari <https://globaleyeintelligence.com/yeonpyeong-island-and-korean-conflict/>

## 2.2 Respon Korea Selatan terhadap Ancaman Uji Coba Nuklir Korea

### Utara

Pada awal pemerintahan sejak terbentuknya Republik Korea, Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan dijalankan di bawah kepemimpinan yang otoriter. Perang Korea yang terjadi di sekitar tahun 1950-1953 diakibatkan karena perbedaan ideologi di antara kedua Semenanjung Korea. Korea Utara mempunyai ideologi sosialis komunis yang memiliki kebijakan *One Policy* dalam menjalankan pemerintahannya. *One Policy* merupakan keinginan untuk mengkomunikasikan seluruh semenanjung Korea dengan kekuatan militer.<sup>72</sup> Sedangkan Korea Selatan dibawah payung Amerika mempunyai ideologi liberal demokrasi. Korea Selatan ingin Korea Utara bergabung menjadi satu dengan pemerintahan anti komunisme. Setelah tiga tahun berperang, kedua Korea akhirnya setuju untuk menandatangani gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Gencatan senjata itu menandakan berakhirnya perang Korea. Perang Korea telah berakhir bukan berarti masalah diantara keduanya selesai. Sampai sekarang, Kedua Korea belum menandatangani perjanjian damai sehingga secara tidak langsung kedua negara masih dalam keadaan perang. Setelah perang Korea berakhir, Korea Selatan dan sekutunya Amerika Serikat melakukan kerjasama pertahanan di tahun 1953, Sedangkan Korea Utara mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan China.

---

<sup>72</sup> Peace and Cooperation: White Paper on Korean Unification, 1996 (diakses pada: 7 November 2014); tersedia di <http://eng.unikorea.go.kr>, hal. 29

Dalam Konferensi Geneva (26 April - 15 Juni 1954) yang membahas mengenai perpecahan politik di Korea, Rhee Syngman menuntut adanya pemilu di Korea Utara di bawah pengawasan PBB untuk mengisi sepertiga kursi DPR Republik Korea dan mengenai keinginan Seoul agar pasukan militer Tiongkok harus sudah ditarik seluruhnya dari Korea selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan pemilu tersebut. Namun tuntutan itu ditolak Korea Utara dan sekutu komunisnya. Pihak Korea Utara menginginkan adanya komisi seluruh Korea yang mengatur pemilu Korea di bawah pengawasan kelompok negara netral bukan PBB.<sup>73</sup> Pada akhirnya, Kim Il Sung sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara kala itu tetap menerapkan kebijakan reunifikasi di bawah ideologi komunisme, sedangkan Rhee Syngman yang merupakan pemimpin pertama Korea Selatan yang menerapkan kebijakan reunifikasi anti komunisme.<sup>74</sup> Masa pemerintahan Syngman Rhee yaitu tahun 1948 hingga tahun 1960. Pemerintahan Syngman Rhee mengambil kebijakan “*Pukch'in t'ongil*” atau “*March North for Unification*”, yang secara eksplisit kebijakan ini mengenai penerapan kebijakan unifikasi yang berkaitan dengan Korea Utara. Dalam kebijakan unifikasi, Korea Selatan akan menggunakan kekuatan senjata dan secara tegas menolak hidup secara berdampingan bersama Korea Utara dengan damai.<sup>75</sup>

Presiden Rhee mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan Korea Selatan dari berbagai ancaman Korea Utara seperti ancaman komunis. Rhee

---

<sup>73</sup> Yang, Seung Yoon dan Mochtar Mas'ood. 2004. *Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. hal.32

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Cha, V. D. (2011). “*Rhee-straint*”: *The Origins of the U.S.-ROK Alliance*. *International Journal of Korean Studies*, 6.

dalam mengambil kebijakannya yaitu berdasarkan ideologi yang ia anut, yaitu ideologi anti komunis dan anti Jepang. Pemerintahan Presiden Syngman Rhee lengser pada April 1960 karena digulingkan oleh mahasiswa yang melakukan aksi pemberontakan.<sup>76</sup>

Kemudian pada tahun 1962, Korea Selatan berada dibawah kepemimpinan Presiden Park Chung Hee lebih memprioritaskan pada pembangunan ekonomi rakyat. Korea Selatan mulai mampu menunjukkan kemajuannya dengan kebijakan *Saemaul Undong* yang dibuat oleh presiden Park. Mengenai isu reunifikasi Korea, Presiden Park Chung Hee kebijakan anti komunisme seperti para pemimpin terdahulunya. Walaupun begitu, Korea Selatan tetap mencoba untuk menggunakan dialog dan negosiasi untuk mencapai kebijakan unifikasi Korea. Namun, Korea Utara menganggap pemerintahan Korea Selatan mencoba untuk memisahkan dan mengganggu masyarakat Korea. Korea Utara masih tidak menyerah bermaksud untuk meng-komuniskan seluruh semenanjung Korea dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan. Sedangkan untuk hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada saat itu hanya terkait untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer.

Pada tanggal 1 Maret 1969, Korea Selatan dibawah Kepemimpinan Park Chung Hee mendirikan Kementerian Unifikasi Korea (*Ministry of Unification*). Kementerian ini dibuat untuk bertanggung jawab atas koordinasi dialog antara kedua Korea dan usaha reunifikasi Korea. Kementerian ini juga berfungsi mengkoordinasi kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Kementerian ini

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

menganalisis mengenai aspek politik, sosial-ekonomi, dan militer Korea Utara. Sebagai badan pemerintah yang dapat berkomunikasi dengan Korea Utara, kementerian unifikasi juga mendorong terjadinya kerjasama antar-Korea. Baik kerjasama ekonomi, sosial, budaya, olahraga, kemanusiaan dan lainnya. Kementerian juga akan memberikan pengetahuan mengenai unifikasi kepada publik.<sup>77</sup>

Setelah berdirinya Kementerian Unifikasi dan ketegangan antara Semenanjung Korea di masa lampau, upaya reunifikasi dan rekonsiliasi di antara kedua Korea dimulai pada tahun 1971. Di bulan Agustus tahun 1971, Korea Selatan memprakarsai adanya pembicaraan antara Palang Merah Nasional Republik Korea dan Palang Merah Korea Utara untuk membahas mengenai isu kemanusiaan keluarga yang terpisah.<sup>78</sup> Pada akhirnya, Korea Utara dan Korea Selatan mengumumkan adanya pernyataan bersama di tanggal 4 Juli 1972. Hal ini merupakan suatu langkah kemajuan dari hubungan kedua Korea yang menuntun ke dalam usaha penyatuan kembali semenanjung Korea.<sup>79</sup> Beberapa hal penting dari pernyataan bersama itu adalah:

1. Reunifikasi akan berlangsung tanpa ketergantungan pada atau intervensi oleh bangsa asing dan reunifikasi akan dicapai dengan sarana damai.

---

<sup>77</sup> Ministry of Unification Republic of Korea. 1996. *About MOU*, (diakses pada 3 Agustus 2025); dapat diakses di <http://eng.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1826>

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal 18-19.

<sup>79</sup> Mas'ood, M, & Seung-Yoon, Y (2005). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gajah Mada University, hal.102.

2. Kedua belah pihak harus mengambil langkah - langkah untuk menghentikan propaganda melawan satu sama lain, menghentikan agresi militer dan mencegah terjadinya bentrokan militer.

3. Kedua belah pihak harus melakukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta bekerja sama dalam mewujudkan pembicaraan antar Palang Merah Korea, membuka jalur telekomunikasi di antara Seoul dan Pyongyang, dan membentuk sebuah komite mediasi antara utara dan selatan.<sup>80</sup>

### **2.2.1 Era Pemerintahan Roh Tae Woo (1988–1993)**

Di era kepemimpinan Presiden Roh Tae-woo, Korea Selatan mengalami kemajuan signifikan, baik di bidang ekonomi maupun politik luar negeri. Dalam aspek ekonomi, peningkatan perdagangan internasional menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan nasional. Sementara dalam konteks hubungan internasional, posisi Korea Selatan semakin diperhitungkan di panggung global, ditandai dengan keberhasilannya menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul pada tahun 1988, yang secara simbolis menunjukkan keterbukaan dan modernisasi negara tersebut.<sup>81</sup> Seiring dengan meningkatnya posisi tawar Korea Selatan secara global, pemerintahan Presiden Roh Tae-woo menginisiasi pendekatan baru terhadap Korea Utara melalui kebijakan *Nordpolitik* atau diplomasi utara.<sup>82</sup> Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan Korea Utara melalui pembentukan hubungan

---

<sup>80</sup> Ministry of Unification Republic of Korea. *About MOU : History of Inter-Korean Relations*. Diakses di [https://www.unikorea.go.kr/eng\\_unikorea/about/aboutmou/history/](https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/about/aboutmou/history/) (pada 4 Agustus 2025, pukul 21:23 wib)

<sup>81</sup>Chalmers Johnson, *South Korean Democratization: The Role of Economic Development*, *The Pacific Review*, Vol.2, no. 1, 1989, hal 8.

<sup>82</sup> Dan C. Sandford, ROK's nordpolitik: Revisited, *The Journal of East Asian Affairs*, vol. 7, no.1 (Winter/Spring 1993), hal 1-4.

diplomasi seperti pertukaran budaya dan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara komunis sekutu Pyongyang, seperti Uni Soviet (1990), Tiongkok (1992).<sup>83</sup> Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melibatkan negara-negara kunci tersebut dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog antar-Korea, dengan harapan bahwa pengaruh politik negara-negara tersebut dapat memberikan tekanan positif terhadap sikap dan kebijakan rezim Korea Utara, khususnya terkait isu keamanan di Semenanjung Korea. Namun, pembukaan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Tiongkok dan Rusia justru dipersepsikan secara negatif oleh Korea Utara, yang menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan dari sekutu tradisionalnya. Pyongyang merasa semakin terisolasi secara diplomatik, terutama karena hilangnya dukungan eksplisit dari negara-negara yang sebelumnya menjadi mitra utamanya dalam menghadapi tekanan internasional terkait program nuklirnya.

Dalam upaya lebih lanjut untuk meredakan ketegangan, Presiden Roh Tae-woo mengajukan berbagai inisiatif damai kepada Korea Utara. Pada tahun 1988, ia menawarkan peningkatan hubungan ekonomi dan interaksi antar individu lintas perbatasan.<sup>84</sup> Ia juga mengusulkan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi antar-Korea, termasuk perumusan deklarasi non-agresi serta pembentukan forum konsultatif yang melibatkan kedua Korea bersama empat negara kunci (Amerika

---

<sup>83</sup> Dan C. Sandford, ROK's nordpolitik: Revisited, *The Journal of East Asian Affairs*, vol. 7, no.1 (Winter/Spring 1993), hal 1-4.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal 4.

Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Jepang) sebagai sarana mempromosikan keamanan di wilayah Semenanjung Korea dan membahas isu-isu keamanan kawasan.<sup>85</sup>

Semangat kerjasama yang tumbuh antara Korea Selatan dan Korea Utara selama masa kepemimpinan Presiden Roh Tae-woo mencapai puncaknya dalam bentuk komitmen bersama untuk menjadikan Semenanjung Korea sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Sebagai wujud dari keseriusan tersebut, Presiden Roh Tae-woo secara tegas menyampaikan bahwa Korea Selatan akan menggunakan energi nuklir semata-mata untuk tujuan damai, yakni sebagai sumber energi. Ia menegaskan bahwa:

*“South Korea will only use nuclear solely as an energy source and only for peaceful purposes. South Korea will not produce, store, develop and use nuclear weapons.”*<sup>86</sup>

Salah satu pencapaian penting dari pendekatan tersebut adalah lahirnya *“Initiative for Denuclearization and Peace on the Korean Peninsula”* yang diumumkan pada 18 November 1991.<sup>87</sup> Inisiatif ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *North-South Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula* pada 31 Desember 1991.<sup>88</sup> Melalui *Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula* yang ditandatangani pada akhir tahun 1991, Korea Selatan dan Korea Utara menyepakati sejumlah ketentuan penting antara lain<sup>89</sup>:

---

<sup>85</sup>Young Jeh Kim, *North Korea's Nuclear Program and Its Impact on Neighboring Countries*, dalam *Korea and World Affairs*, Vol 17, No.3, Fall 1993, hal 479.

<sup>86</sup>Chalmers Johnson, *Loc. Cit.*, hal. 10.

<sup>87</sup>Soo-hang Lee, *Seoul's Unification Approach and Perspective on Peace and Security*, dalam Amos A. Jordan (ed), *Korean Unification: Implication's For Northeast Asia*, (Washington: CSIS), hal.21.

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*

1. Korea Selatan dan Korea Utara tidak diperbolehkan untuk melakukan uji coba, memproduksi, menerima, menyimpan, mengirim, atau menggunakan senjata nuklir dalam bentuk apa pun.

2. Kedua negara sepakat bahwa pemanfaatan energi nuklir hanya akan diperuntukkan bagi tujuan damai.

3. Korea Selatan dan Korea Utara tidak akan membangun fasilitas pemrosesan ulang bahan bakar nuklir atau fasilitas produksi uranium yang dapat digunakan untuk kepentingan militer.

4. Untuk memastikan pelaksanaan komitmen tersebut, kedua negara akan melakukan inspeksi bersama terhadap fasilitas-fasilitas yang telah disepakati.

Proses inspeksi ini dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh *South-North Joint Nuclear Control Commission*.

Sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh kedua Korea turut memberikan kontribusi positif terhadap proses transformasi keamanan di Semenanjung Korea. Komunikasi intensif yang terjalin antara Korea Selatan dan Korea Utara selama periode ini mendorong terbentuknya rasa saling percaya di antara kedua pihak, yang menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas regional. Salah satu langkah konkret yang memperkuat hubungan bilateral ini adalah keputusan Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk meniadakan latihan militer gabungan tahunan “*team spirit*” pada tahun 1992.<sup>90</sup> Latihan militer tersebut sebelumnya menimbulkan kekhawatiran serius bagi Korea Utara, karena dinilai melibatkan pengerahan kekuatan militer dalam skala besar dan dianggap berpotensi sebagai persiapan

---

<sup>90</sup>Mel Gurtov., *Loc. Cit.* hal 10.

strategi ofensif terhadap wilayahnya. Penghentian latihan *team spirit* dipandang sebagai sinyal positif dari Korea Selatan dan Amerika Serikat yang membuka ruang bagi upaya diplomatik lebih lanjut.

Sebagai tanggapan atas kebijakan tersebut, Korea Utara menunjukkan itikad baik melalui langkah-langkah konkret dalam ranah non-proliferasi nuklir. Pada bulan Mei 1992, Korea Utara secara resmi meratifikasi *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) dan menandatangani *safeguard agreement* dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Tidak hanya itu, Korea Utara juga mengizinkan tim dari IAEA untuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklirnya. Langkah-langkah ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam membangun kepercayaan dan memperkuat stabilitas keamanan di Semenanjung Korea melalui pendekatan diplomatik dan kerja sama multilateral.

### **2.2.2 Era Pemerintahan Kim Young Sam (1993-1998)**

Perlu dicatat bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Kim Young-sam, peran Korea Selatan dalam proses transformasi keamanan di Semenanjung Korea cenderung kurang dominan. Hal ini terlihat, misalnya, dalam penyelesaian krisis nuklir tahun 1994, di mana jalur diplomasi utama berlangsung secara langsung antara Korea Utara dan Amerika Serikat tanpa keterlibatan aktif Korea Selatan sebagai pihak sentral. Kontak bilateral antara Pyongyang dan Washington pada saat itu secara implisit menunjukkan adanya kecenderungan untuk "mengecualikan" Korea Selatan dalam proses pencarian solusi atas krisis tersebut. Meskipun demikian, ketidakhadiran dominasi Korea Selatan dalam proses diplomatik bukan berarti bahwa pemerintahan Kim Young-sam tidak memberikan kontribusi sama

sekali. Pemerintah Korea Selatan tetap memainkan peran penting dalam koordinasi kebijakan, khususnya dalam kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Kim Young-sam menghadapi situasi yang sangat genting ketika krisis yang bermula dari penolakan Korea Utara terhadap permintaan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) untuk melakukan inspeksi khusus terhadap fasilitas nuklir yang dicurigai, serta keputusannya untuk menarik diri dari perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*) pada tahun 1993, tindakan ini memicu krisis nuklir Korea Utara pertama. Respons awal Amerika Serikat lebih didominasi pendekatan hukum teknokratis oleh IAEA, yang mengabaikan aspek politik dan keamanan yang menjadi motif utama Korea Utara. Tekanan termasuk latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat "*Team Spirit*" pada 8 Maret 1994, memperburuk ketegangan hingga mendekati konfrontasi terbuka.<sup>91</sup> Penunjukan Robert Gallucci sebagai negosiator utama menandai perubahan pendekatan dengan mempertimbangkan kebutuhan politik strategis Korea Utara, seperti jaminan keamanan dan normalisasi hubungan bilateral. Namun, negosiasi menghadapi hambatan signifikan, baik dari perdebatan internal pemerintahan Amerika Serikat dan komunitas nonproliferasi, maupun kesulitan koordinasi dengan pemerintah Korea Selatan.<sup>92</sup> Upaya menyelaraskan posisi Washington dan Seoul justru memperlambat proses, sehingga fleksibilitas dalam negosiasi dengan Pyongyang semakin berkurang.

---

<sup>91</sup>Harrison, S. S. (2002). *Korean endgame: A strategy for reunification and U.S. disengagement*. Princeton University Press. hal. 208

<sup>92</sup>*Ibid.*

Keterlibatan diplomatik Amerika Serikat yang semakin dalam, termasuk dalam penyusunan pernyataan bersama dengan Korea Utara dan rencana pemberian reaktor air ringan (*Light Water Reactor/LWR*), menimbulkan reaksi keras dari kalangan konservatif di Korea Selatan.<sup>93</sup> Pemerintahan Presiden Kim Young-sam memandang bahwa kebijakan Amerika Serikat terlalu mengakomodasi tuntutan Korea Utara tanpa konsultasi memadai dengan Seoul. Rasa tidak puas semakin kuat ketika pejabat Korea Selatan mengetahui isi pernyataan bilateral US–DPRK dari pihak Korea Utara terlebih dahulu, bukan dari sekutunya sendiri.<sup>94</sup> Selain itu, usulan pemberian reaktor air ringan dipandang sebagai konsesi yang tidak seimbang dan berisiko memperkuat stabilitas rezim Korea Utara, yang justru bertentangan dengan kepentingan strategis Seoul yang menghendaki terjadinya perubahan fundamental atau bahkan keruntuhan di Utara. Akibatnya, kebijakan Amerika Serikat yang bersifat intervensif tetapi tidak terkoordinasi secara menyeluruh dengan sekutu utamanya justru memperdalam ketegangan politik di dalam negeri Korea Selatan dan mengganggu kohesi strategi aliansi di tengah krisis regional yang semakin memanas.

Korea Selatan di bawah presiden Kim Young-sam, menanggapi krisis tersebut dengan mengadopsi *hard approach* yang disebut “*coercive-realistic absorption and annexation policy*” yaitu kebijakan atau strategi yang bertujuan untuk memaksa Korea Utara melalui tekanan militer dan ekonomi agar runtuhnya rezim di Pyongyang. Sikap keras ini banyak dipengaruhi oleh pandangan

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hal.211

<sup>94</sup>*Ibid.*

konservatif pemerintah Kim Young-sam dan didorong oleh dinamika geopolitik seperti keruntuhan rezim-rezim sosialis, kematian Kim Il-sung, serta krisis ekonomi parah yang dialami Korea Utara, sehingga keruntuhan rezim Korea Utara kala itu dianggap realistis.<sup>95</sup>

Konstruksi persepsi terhadap Korea Utara pun tidak sama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang kemudian mempengaruhi koordinasi kebijakan kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan regional di Semenanjung Korea. Pemerintahan Clinton mempertimbangkan untuk melakukan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Yongbyon milik Korea Utara, tempat fasilitas nuklir berbasis plutonium berada<sup>96</sup>. Namun, pemerintahan era presiden Kim Young-sam menentang keras eskalasi militer ini karena berisiko menimbulkan konflik bersenjata di Semenanjung Korea.<sup>97</sup>

Krisis nuklir di Semenanjung Korea berhasil diredakan pada bulan Juni 1994 melalui mediasi mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, yang secara langsung melakukan kunjungan diplomatik ke Pyongyang dan merumuskan kerangka awal kesepakatan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara saat itu, Kim Il-sung. Inisiatif ini kemudian memperoleh dukungan resmi dari pemerintahan

---

<sup>95</sup>National Archives of Korea. 2006. *햇볕정책 [Sunshine Policy]*. Government of the Republic of Korea. Diakses pada 14 Mei 2025, dari

<https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=003343&sitePage=>

<sup>96</sup>PBS' Frontline interview with William Perry, U.S. Secretary of Defense, 1994-1997. "Interview: William Perry," Kim's Nuclear Gamble, April 10, 2003, <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/interviews/perry.html>.

<sup>97</sup>Lee, C.-K. (2009). North Korea's policy toward the United States and the coordination between the United States and South Korea – A Korean perspective. In J.-H. Bae & A. Denmark (Eds.), *The U.S.-ROK alliance in the 21st century* (p. 125). Korea Institute for National Unification.

Presiden Bill Clinton.<sup>98</sup> Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Utara sepakat untuk membekukan program produksi plutoniumnya sebagai imbalan atas bantuan berupa pembangunan reaktor tenaga nuklir berbasis air ringan (*light-water reactor/LWR*) dari Amerika Serikat, serta pembukaan jalur menuju normalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara.

Meskipun Kim Il-sung wafat pada bulan Juli 1994, proses negosiasi bilateral tetap dilanjutkan di bawah kepemimpinan putranya, Kim Jong-il.<sup>99</sup> Tiga bulan setelah wafatnya Kim Il-sung, perundingan tersebut mencapai titik krusial dengan ditandatanganinya *Agreed Framework* pada bulan Oktober 1994. Dalam kerangka kesepakatan ini, Korea Utara menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi anggota *Non-Proliferation Treaty* (NPT), membekukan seluruh kegiatan fasilitas produksi plutonium, dan secara bertahap membongkarnya di bawah pengawasan internasional. Sebagai bentuk imbal balik, Korea Utara dijanjikan bantuan energi berupa dua unit reaktor LWR serta dukungan teknis dan logistik dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya.<sup>100</sup>

Sebagai implementasi dari *Agreed Framework*, Korea Utara mematuhi ketentuan pembekuan program plutonium dengan mengizinkan pemasangan perangkat verifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), termasuk proses penyegelan (*canning*) terhadap batang bahan bakar bekas di reaktor Yongbyon, serta pengawasan permanen melalui sistem pemantauan jarak jauh dan

---

<sup>98</sup>Congressional Research Service. (2023, Desember 11). *Nuclear negotiations with North Korea* (CRS Report No. R45033).hal. 3. Diakses dari <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45033>, pada 18 Mei 2025.

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>*Ibid.*, hal. 4.

keberadaan inspektur internasional di fasilitas nuklir terkait.<sup>101</sup> Di samping itu, perjanjian tersebut juga mencantumkan komitmen Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan resmi kepada Korea Utara terhadap ancaman atau penggunaan senjata nuklir oleh pihak Amerika Serikat<sup>102</sup>. Kedua negara turut menyatakan tekad untuk melakukan normalisasi hubungan politik dan ekonomi, termasuk pelanggaran sanksi ekonomi oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

### **2.2.3 Era Pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2001)**

Pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung, Korea Selatan menerapkan pendekatan baru dalam menjalin hubungan dengan Korea Utara. Pendekatan ini berangkat dari paradigma yang lebih terbuka, menghargai, dan tidak konfrontatif terhadap Korea Utara. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Kim Dae Jung menegaskan bahwa kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara akan berlandaskan pada tiga prinsip utama berikut<sup>103</sup>:

1. Tidak ada toleransi terhadap provokasi militer dari Korea Utara, yang berarti Korea Selatan tidak akan menanggapi ancaman militer secara reaktif atau emosional.
2. Tidak memandang rendah atau meremehkan legitimasi pemerintah Korea Utara

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> U.S. Department of State, "Agreed Framework Between the United States of America and the Democratic People's Republic of Korea," October 21, 1994. Diakses dari <https://2001-2009.state.gov/t/ac/rls/or/2004/31009.htm>, pada 18 Mei 2025.

<sup>103</sup> Uk Heo and Chong-Min Hyun, An Analysis of South Korea's Policy Toward North Korea, Pacific Focus; Inha Journal of International Studies, Spring 2001, Vol XVI, No.1, (Center for International Studies, 2004), hal.94.

3. Menjalinkan hubungan dengan Korea Utara atas dasar saling menghormati.

Dalam masa pemerintahannya, presiden Kim Dae Jung meresmikan kebijakan baru yaitu *Sunshine Policy*. Kebijakan *Sunshine Policy* ini bertujuan untuk menciptakan hubungan damai dan kooperatif antara kedua negara dengan mengesampingkan isu-isu politik dan militer yang selama ini menjadi sumber ketegangan.<sup>104</sup> Pendekatan ini tidak hanya mendorong rekonsiliasi melalui dialog dan kerja sama, tetapi juga membuka peluang bagi kalangan dunia usaha Korea Selatan untuk berinvestasi di Korea Utara tanpa halangan dari kebijakan politik domestik.<sup>105</sup> Melalui kebijakan ini, Korea Selatan berharap dapat membangun kepercayaan jangka panjang yang mampu mendukung transformasi keamanan di Semenanjung Korea secara berkelanjutan.<sup>106</sup>

Kebijakan *Sunshine Policy* di bawah Presiden Kim Dae-jung berhasil menarik minat investor Korea Selatan untuk menanamkan modal di Korea Utara tanpa terhalang oleh hambatan peraturan pemerintah maupun persoalan politik.<sup>107</sup> Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam kebijakan ini memisahkan isu politik dan militer dari hubungan ekonomi kedua negara. Bahkan, kerja sama ekonomi tetap dilanjutkan meskipun terjadi ketegangan politik, seperti uji coba rudal Taepodong

---

<sup>104</sup> Hong Nack Kim, The Kim Dae-Jung Government's North Korea Policy Problems and Prospects, Korea and World Affairs, Vol XXIII, No. 3, Fall 1999 (Korea; Research Center for Peace and Unification of Korea, 1999), hal.9.

<sup>105</sup> Keun-Sik Kim, Inter-Korean relations and The Future of the Sunshine Policy, The Journal of East Asian Affairs, Vol. XVI, No. 1 Spring/Summer 2002, (The Research Institute for International Affairs, Seoul, Korea 2002), hal.98.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal.99.

<sup>107</sup> Okmin Chung, The Sunshine Policy, Korea and World Affairs, Vol 24, No.1, Spring 2000, (Research Center for Peace and Unification of Korea, 2000), hal.12.

dan insiden kapal selam Korea Utara pada tahun 1998.<sup>108</sup> Pendekatan ini merupakan pergeseran fundamental dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang menjadikan isu keamanan sebagai faktor utama dalam interaksi antara dua Korea.

Prinsip dasar *Sunshine Policy* yang berlandaskan pada perdamaian, rekonsiliasi, dan kerja sama dijabarkan lebih lanjut melalui enam langkah strategis sebagai berikut<sup>109</sup>:

1. Mengusahakan keamanan nasional secara bersama melalui rekonsiliasi dan kerja sama.
2. Mewujudkan kehidupan bertetangga yang damai melalui pertukaran masyarakat antara Korea Selatan dan Korea Utara.
3. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya perubahan internal di Korea Utara.
4. Mendorong terbentuknya situasi yang saling menguntungkan secara ekonomi.
5. Menggalang dukungan dari masyarakat internasional untuk keberlanjutan kebijakan *Sunshine Policy*.
6. Mengupayakan konsensus domestik di Korea Selatan terkait kebijakan terhadap Korea Utara.

Puncak dari pelaksanaan kebijakan ini terjadi pada *North-South Joint Declaration* tanggal 15 Juni 2000, ketika kedua negara menyepakati kerja sama di berbagai bidang dan komitmen untuk melakukan dialog lanjutan.<sup>110</sup> Setelah

---

<sup>108</sup> Keun-Sik Kim., *Loc. Cit.*, hal.99.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal.101-102.

<sup>110</sup> Hong Nack Kim., *Loc. Cit.* hal.9.

pertemuan tersebut, Korea Utara dan Korea Selatan menjaga momentum dengan melakukan pertemuan tingkat menteri, pertemuan pertahanan, serta membentuk komite kerja sama ekonomi.<sup>111</sup> Komunikasi ini menandai peningkatan intensitas dialog resmi dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Korea Selatan juga menginisiasi program pertukaran kunjungan keluarga yang terpisah akibat pembagian Korea, dengan rata-rata 6.000 warga Korea Selatan mengunjungi Korea Utara setiap tahun antara 1998 hingga 2001.<sup>112</sup> Selain itu, kedua negara berupaya membangun saling ketergantungan ekonomi, salah satunya melalui pembangunan jalur kereta api Seoul–Shinuiju dan Kawasan Industri Gaesong.<sup>113</sup> Pada tahun 2001, nilai perdagangan bilateral mencapai US\$425 juta, mencerminkan peningkatan signifikan.<sup>114</sup> Dengan berbagai capaian tersebut, banyak pihak menilai *Sunshine Policy* telah berkontribusi besar dalam menciptakan stabilitas di Semenanjung Korea. Stabilitas ini juga memunculkan arus investasi dari Korea Selatan ke Korea Utara serta dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Rusia. Pengakuan terhadap keberhasilan ini diwujudkan dengan penghargaan Nobel Perdamaian kepada Presiden Kim Dae-jung.

Namun, dinamika politik internasional pasca serangan 11 September 2001 menimbulkan tantangan baru. Pemerintahan Presiden George W. Bush menggolongkan Korea Utara sebagai bagian dari “*Axis of Evil*” dan menyebutnya

---

<sup>111</sup>Keun-Sik Kim., Loc. Cit, hal.104.

<sup>112</sup>*Ibid.*, hal. 105.

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>*Ibid.*

sebagai target potensial dalam dokumen *Nuclear Posture Review*.<sup>115</sup> Sebagai respons, Korea Utara memprotes kebijakan Korea Selatan terkait isu terorisme dan membatalkan program pertukaran keluarga pada Oktober 2001<sup>116</sup>. Dalam pertemuan tingkat menteri ke-6 yang diadakan pada November 2001 di Gunung Kumgang, Korea Selatan menekankan pentingnya rasa persaudaraan dan kelanjutan dialog serta kerjasama.<sup>117</sup> Namun, pertemuan ini berakhir dengan penolakan dari delegasi Korea Utara, yang menyatakan bahwa dialog antar-Korea mengalami kebuntuan.<sup>118</sup>

#### **2.2.4 Era Pemerintahan Roh Moo Hyun (2003-2008)**

Krisis nuklir kembali mencuat di Semenanjung Korea pada tahun 2003, bertepatan dengan masa awal pemerintahan Presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahannya, terutama karena krisis tersebut tidak dalam posisi yang menguntungkan bagi Korea Selatan. Meski demikian, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan tetap berlangsung relatif stabil, karena penyebab utama krisis tersebut lebih banyak berkaitan dengan ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, serta ketidakpatuhan Korea Utara terhadap kesepakatan *Agreed Framework* tahun 1994. Dalam menghadapi situasi ini, Presiden Roh Moo-hyun memperkenalkan kebijakan *Policy for Peace*

---

<sup>115</sup>Peter Van Ness, *The North Korean Nuclear Crisis; Four-Plus-Two-An Idea Whose Time Has Come*, hal.2.

<sup>116</sup>James T. Laney and Jason T. Shaplen, *How to Deal with North Korea*, *How to Deal with North Korea*, *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 2 (Mar. - Apr., 2003), hal.28.

<sup>117</sup>*Ibid.*, James T. Laney, et.al., hal.25.

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal.28

*and Prosperity* yang difokuskan pada upaya menjaga stabilitas regional sekaligus mendukung reunifikasi antar-Korea.<sup>119</sup>

Kebijakan *peace and prosperity* merupakan perluasan dari pendekatan *reconciliation and cooperation policy* yang telah diterapkan pada masa pemerintahan Kim Dae-jung sebelumnya.<sup>120</sup> Kebijakan ini berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu:

1. Semua isu dan persoalan antar-Korea harus diselesaikan melalui dialog dan mencapai kesepakatan secara damai.
2. Hubungan kedua negara didasarkan pada prinsip timbal balik yang saling menguntungkan dan memperkuat rasa saling percaya.
3. Konflik di Semenanjung Korea sebaiknya diselesaikan oleh kedua pihak secara langsung, meskipun tetap terbuka terhadap konsultasi dengan komunitas internasional.
4. Pemerintah Korea Selatan berupaya memahami dengan lebih jelas kebijakan domestik dan luar negeri Korea Utara yang berpotensi menjadi hambatan dalam proses dialog.
5. Korea Selatan berusaha menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam bidang ekonomi dan militer dengan Korea Utara berdasarkan prinsip pembangunan kepercayaan.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Hyoeng Jung Park, First Year of the Roh Moo-Hyun Administration, Korea and World Affairs, Vol XXXIV, No. 4, winter 2003, (Korea: Research Center for Peace and Unification of Korea 2003), hal.9.

<sup>120</sup>Keun-Sik Kim., *Loc. Cit*, hal.10-11.

<sup>121</sup>*Ibid.*

Lebih lanjut, kebijakan *peace and prosperity* oleh presiden Roh Moo Hyun disusun dalam tiga tahapan utama sebagai strategi bertahap untuk mencapai tujuan akhir, yaitu pembentukan rezim damai permanen di Semenanjung Korea, antara lain<sup>122</sup>:

1. Tahap pertama, fokus pada penyelesaian isu nuklir dan penciptaan perdamaian di kawasan.
2. Tahap kedua, diarahkan pada pembangunan kerja sama ekonomi antar-Korea serta peletakan dasar bagi terbentuknya rezim damai.
3. Tahap ketiga, ditujukan untuk mencapai kesepakatan damai formal (*peace treaty*) dan membentuk rezim damai yang bersifat permanen.

Melalui pendekatan bertahap ini, pemerintahan Roh Moo Hyun berupaya membentuk tatanan hubungan inter-Korea yang lebih stabil dan berkelanjutan, dengan mengedepankan penyelesaian damai dan pembangunan kepercayaan di berbagai sektor strategis.

### **2.2.5 Era Pemerintahan Lee Myung Bak (2008-2013)**

Kebijakan baru pemerintah Lee Myung-Bak terhadap Korea Utara didasarkan pada penilaian bahwa *Sunshine Policy* yang dijalankan oleh dua pemerintahan sebelumnya gagal mencapai tujuan utama yakni tercapainya rekonsiliasi yang sejati antara kedua Korea dengan mengubah Korea Utara menjadi negara damai dan normal, bukan lagi negara militan dan revisionis.<sup>123</sup> Kebijakan

---

<sup>122</sup> James T. Laney, et.al., *Loc. Cit.* hal.19.

<sup>123</sup> Kim, H. N. (2008). *The Lee Myung-Bak Government's North Korea Policy And the Prospects for Inter-Korean Relations. International Journal of Korean Studies*, Vol. XII, No. 1 (Fall/Winter 2008), hlm. 4.

keterlibatan yang dijalankan oleh pemerintahan Roh dan Kim tidak berhasil mendorong Pyongyang melakukan reformasi yang diperlukan serta membuka diri kepada dunia luar. Selain itu, kebijakan tersebut juga gagal mencegah program senjata nuklir Korea Utara. Melalui konsesi sepihak dan bantuan besar-besaran kepada Korea Utara, kebijakan tersebut justru secara tidak langsung memperkuat posisi internasional dan domestik Pyongyang setelah tahun 2002, bukannya menyelesaikan krisis nuklir kedua pada tahun tersebut. Misalnya, ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada Oktober 2006, presiden Roh Moo Hyun tetap melanjutkan kebijakan yang sama.<sup>124</sup>

Melihat kegagalan kebijakan *Sunshine* dalam meredam ambisi nuklir Korea Utara, pemerintahan Lee Myung-Bak berpendapat bahwa Korea Selatan harus meninggalkan pendekatan unilateral yang bersifat mengalah (*appeasement*) dan beralih ke kebijakan yang lebih realistis dan efektif guna mendorong denuklirisasi Korea Utara. Pemerintah Lee menolak anggapan bahwa rezim Korea Utara dapat diajak melakukan reformasi dan keterbukaan melalui bantuan ekonomi yang besar-besaran.<sup>125</sup>

Ada beberapa poin utama dalam kebijakan terhadap Korea Utara di era presiden Lee Myung Bak, yaitu antara lain<sup>126</sup>:

1. Pertama, tujuan utama adalah pembongkaran program senjata nuklir Korea Utara. Untuk itu, pemerintah Lee Myung Bak berupaya memperkuat aliansi

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>125</sup> Hyeong Jung Park, "Lee Administration's North Korea Policy in the Context of Northeast Asian International Relations," *Korea and World Affairs*, Vol. 32, No.1, Spring 2008, hal.21.

<sup>126</sup> "Lee's Foreign Policy Based on Pragmatism: President-elect Takes Realistic Approach toward North Korea," *Korea Policy Review*, January 2008, hal.10-13.

dengan Amerika Serikat sebagai fondasi utama keamanan nasional dan stabilitas kawasan. Selain itu, hubungan dengan Jepang juga diperbaiki mengingat kepentingan bersama dalam isu keamanan regional.

2. Kedua, pemerintahan presiden Lee berkomitmen memimpin upaya penyatuan Korea secara damai berdasarkan demokrasi dan ekonomi pasar. Korea Selatan tidak akan memohon dialog dengan Pyongyang dan mengambil sikap lebih tegas terkait pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara, termasuk mendukung resolusi PBB yang mengutuk pelanggaran tersebut, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang cenderung abstain.

3. Ketiga, Korea Selatan tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan apabila diminta oleh Pyongyang, namun dengan syarat pengawasan yang ketat dan adanya timbal balik, seperti pemulangan tawanan perang dan pencarian keluarga yang terpisah akibat perang Korea.

4. Keempat, bantuan ekonomi akan dikaitkan secara langsung dengan kemajuan denuklirisasi Korea Utara<sup>127</sup>. Jika rezim Kim Jong-Il mengambil langkah tegas untuk membongkar program senjata nuklirnya dan meliberalisasi ekonominya, Korea Selatan akan membantu pengembangan ekonomi Pyongyang dengan menyediakan dana serta pengetahuan teknis<sup>128</sup>. Singkatnya, bantuan ekonomi Korea Selatan kepada Korea Utara bersifat timbal balik dan terkait langsung dengan penghapusan program senjata nuklir Pyongyang. Keterkaitan ini

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, hal.21.

<sup>128</sup>*Ibid.*, hal. 21-22.

secara jelas tercermin dalam rencana ambisius Lee yang dinamakan “*Vision 3000: Denuclearization and Openness.*”<sup>129</sup>

Sejak masa kampanye pemilihan presiden 2007, menjadi jelas bahwa prioritas utama Lee Myung-Bak adalah menghilangkan ancaman nuklir dari Korea Utara dengan memperkuat *Republic of Korea (ROK) – U.S. alliance* serta meningkatkan kerja sama dengan Jepang dan kekuatan lain di Asia Timur Laut.<sup>130</sup> Karena Korea Utara yang memiliki senjata nuklir tidak hanya menjadi ancaman serius bagi Korea Selatan, tetapi juga mengganggu *balance of power* di Semenanjung Korea, presiden Lee Myung Bak tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya yang cenderung kiri, Kim Dae Jung dan Roh Moo-Hyun.<sup>131</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahannya tidak akan memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara kecuali jika Korea Utara secara setia melaksanakan kesepakatan denuklirisasi yang dicapai dalam *Six Party Talks* di Beijing, seperti *the September 19 Joint Statement of 2005*, *the February 13 Agreement of 2007*, dan *the October 3 Agreement of 2007*.<sup>132</sup>

Setelah memenangkan pemilihan presiden, Presiden terpilih Lee Myung Bak menegaskan bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.<sup>133</sup> Dalam pidato pelantikannya, pada 25 Februari 2008, Presiden Lee juga berjanji untuk memperkuat aliansi ROK-AS sebagai tujuan

---

<sup>129</sup> Duk-min Yoon, “Vision 3000, Denuclearization and Openness,” *East Asian Review*, Vol. 20, No. 2, Summer 2008, hal.6.

<sup>130</sup> Hong Nack Kim., *Loc. Cit.* hal.6.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

penting dan mengambil langkah aktif untuk “mengembalikan” aliansi Republik Korea-Amerika Serikat (ROK-AS) yang sebagai pilar utama dalam kerangka keamanan Korea Selatan yang dianggap telah melemah selama masa pemerintahan Roh Moo-Hyun.<sup>134</sup> Presiden Lee menyetujui perluasan hubungan di bidang militer, ekonomi, politik, dan budaya, kerja sama dalam denuklirisasi Korea Utara, percepatan ratifikasi *Free Trade Agreement* (FTA) secara bilateral, serta membuka pasar Korea untuk daging sapi Amerika. Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan aliansi ROK-AS menjadi aliansi strategis untuk abad ke-21.<sup>135</sup> Selain itu, dalam menangani denuklirisasi Korea Utara, presiden Lee Myung Bak juga menilai pentingnya memperkuat kerjasama dengan Jepang. Hubungan kerja sama antara kedua negara tetangga ini tidak hanya vital untuk memajukan kepentingan dan keamanan bersama, tetapi juga untuk mengembalikan “*treacherous treason*” antara Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam menghadapi Korea Utara.<sup>136</sup> Inisiatif pemerintahan Lee untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan aliansi ROK-US, yang dipadukan dengan dimulainya kembali kerja sama erat dengan Jepang, membuat Korea Utara marah. Sebagai tanggapan, Pyongyang meningkatkan kampanye propaganda yang tajam terhadap pemerintahan Lee. Pada 31 Maret 2008, *Rodong Sinmun*, organ resmi rezim Korea Utara, mengkritik kolusi Lee dengan AS dan Jepang “*to establish a triangular military alliance.*” Surat kabar tersebut mengecam kebijakan “*pro-U.S. flunkeyism*” dan “*anti-North Korean*

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Ji-Hyun Kim. 2008, “Korea, U.S. Entering New Stage of Alliance,” *Korea Policy Review*, hal. 6-8.

<sup>136</sup> Hong Nack Kim., *Loc. Cit.* hal.7.

*confrontation*” dari pemerintahan Lee, dengan menyatakan bahwa Lee Myung-Bak sedang “*trying to overturn everything that has been achieved between the North and the South*” sejak penandatanganan *June 15 Joint Declaration* pada tahun 2000.<sup>137</sup>

Kebijakan paling menonjol yang diterapkan sebagai upaya dari reunifikasi dan denuklirisasi dari presiden Lee Myung-bak adalah “*Vision 3000: Denuclearization and Openness*.” Kebijakan ini mengaitkan bantuan ekonomi dengan kemajuan konkret dalam denuklirisasi. Pemerintah Korea Selatan berkomitmen membantu Korea Utara mencapai pendapatan per kapita sebesar USD 3.000 dalam waktu sepuluh tahun, dengan syarat Pyongyang sepenuhnya membongkar program senjata nuklirnya. Visi ini mencakup lima sektor utama: ekonomi, pendidikan, infrastruktur, keuangan, dan kesejahteraan sosial. Ini merupakan strategi jangka panjang yang mengaitkan bantuan dengan kemajuan dalam keamanan regional dan kerja sama internasional. Dalam implementasinya, *Vision 3000* akan berjalan dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai ketika Korea Utara melakukan “*disablement*” terhadap fasilitas nuklirnya. Pada tahap kedua, Korea Selatan dan Korea Utara akan menyusun kerangka kerja hukum untuk kerja sama ekonomi. Tahap ketiga dimulai setelah Korea Utara benar-benar membongkar program nuklirnya secara menyeluruh, yang akan membuka jalan bagi realisasi penuh proyek *Vision 3000*.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Rodong Sinmun. (2008, 31 Maret). *Self-destruction is the only thing that the South Korean authorities will gain through their anti-North confrontation*, dalam, BBC Monitoring Asia Pacific, 1 April 2008.

<sup>138</sup> Duk-min Yoon, “*Vision 3000, Denuclearization and Openness*,” *East Asian Review*, Vol. 20, No. 2, Summer 2008, hal.6.

Tidak mengherankan jika *Vision 3000* dan berbagai platform kebijakan awal dari pemerintahan Lee Myung-bak disambut dengan skeptisisme oleh Korea Utara. Dalam editorial tahun baru bersama yang disiarkan oleh *Korean Central News Agency (KCNA)*, Korea Utara menegaskan agar kedua Korea tetap mematuhi kesepakatan dalam *KTT antar-Korea 2007*, yang mencakup proyek bantuan besar dari Korea Selatan dengan imbal balik yang sangat minim dari pihak Utara.<sup>139</sup>

Lebih jauh dari sekadar reaksi Korea Utara, implementasi *Vision 3000* pun diragukan dari segi realistis. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan yang tidak masuk akal bahwa Korea Utara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan lebih dari 20 persen. Padahal, menurut *North Korea Economy Watch*, “*North Korea’s real annual GDP decreased 2.3% in 2007*,” bahkan lebih buruk dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh krisis pangan akibat penurunan produksi pertanian yang tajam.<sup>140</sup> Tidak pernah dijelaskan secara konkret bagaimana Korea Selatan akan membantu membalikkan tren ini secara instan.

Selain itu, *Vision 3000* juga tidak memperhitungkan ideologi dasar Korea Utara. Dalam versi lengkap nama kebijakan ini, terdapat istilah “*openness*” atau *gaebang*.<sup>141</sup> Istilah ini oleh kalangan ideolog Korea Utara telah disebut “*repeatedly described as a cunning imperialist trick aimed at destroying the North’s socialist system*.” Mereka percaya bahwa satu-satunya cara mempertahankan sistem adalah

---

<sup>139</sup>Dylan Alexander Stent. (2024), *From ‘Marching North’ to ‘De Facto Absorption’: An interpretive historiography of South Korea’s unification policies from 1948 until 2013* (Doctoral thesis, Victoria University of Wellington). Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington, hal.153

<sup>140</sup> North Korean Economy Watch. (2008). *Gross domestic product of North Korea in 2007*. Diakses pada 20 Mei 2025 pukul 02:20 wib, dari <https://www.nkeconwatch.com/nk-uploads/bok-2007.pdf>

<sup>141</sup>Lihat, 2008 통일백서 [2008 Unification White Paper] (Seoul: Ministry of Unification, 2009).

dengan menjaga masyarakat tetap tertutup dan terkontrol secara ketat. Jika rakyat mengetahui kemakmuran luar, khususnya Korea Selatan, maka dapat memicu keresahan dan potensi keruntuhan sistem secara tiba-tiba.<sup>142</sup>

Karena itu, tidak mengherankan jika kebijakan ini dianggap penuh kecurigaan dan ditolak oleh Korea Utara. Hingga pada tanggal 1 April 2008, Rodong Sinmun, media resmi Korea Utara, memuat sebuah artikel yang memuat kalimat respon penolakan sebagai berikut (terjemahan bahasa Inggris oleh *Korean Central News Agency*):

*“The Lee Myung Bak regime of the Grand National Party that emerged in South Korea recently is becoming undisguised in its sycophancy towards the US and confrontation with the DPRK. Lee and his gentries are letting loose such spate of sophism as “priority to the south Korea-US relations”, “complete settlement of the north’s nuclear issue” and “pragmatism”..... No wonder, he revealed his true colors as a sycophant towards the US and anti-north confrontation advocator as soon as he came to power.*

*The anti-North confrontational nature of Lee and the ruling conservative forces was brought to light when they advocated the so-called “no-nukes, opening and bringing the per capita income to 3,000 dollars” as their “policy towards the north.” The above-said piffle is nothing but a very absurd and ridiculous jargon as they cried out for the north’s “complete nuclear abandonment” and “opening” as preconditions for the improvement of the North-South relations. ....”<sup>143</sup>*

Lebih lanjut, *Rodong Sinmun* menegaskan bahwa rencana tersebut disusun tanpa sepengetahuan Korea Utara dan “*with a lack of political sense,*” serta bertujuan untuk menundukkan Korea Utara di bawah kekuatan hegemoni asing.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup>Andrei Lankov. 2008. “Policy Forum 08-045: Koreas Not Eye-to-Eye on Vision 3000.” Nautilus Institute. Diakses pada 20 Mei 2025 pukul 02:30 wib, dari <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-policy-forum/koreas-not-eye-to-eye-on-vision-3000/>

<sup>143</sup>KCNA. 2008. “Lee Myung Bak Regime’s Sycophancy towards U.S. and Anti-DPRK Confrontation Hysteria Blasted.”KCNA. Diakses pada 20 Mei 2025, pukul 02:43 wib, dari <http://www.kcna.co.jp/item/2008/200804/news04/01.htm>

<sup>144</sup>Rodong Sinmun. 2008. “Self-Destruction Is the Only Thing That the South Korean Authorities Will Gain Through Their Anti-North Confrontation.”. Diakses dalam <https://kcnawatch.org/>, pada 20 Mei 2025, pukul 02:50 wib.

Meskipun tampak tidak mengancam, kebijakan *Vision 3000* dari pemerintahan Lee Myung-bak sejatinya menekankan upaya untuk mendorong Korea Utara melakukan reformasi. Salah satu contohnya adalah rencana untuk membantu transisi ekonomi Korea Utara menjadi berbasis ekspor melalui pengembangan 100 perusahaan dan lima zona perdagangan bebas, yang hanya akan direalisasikan jika Korea Utara memulai proses denuklirisasi dan tunduk pada sistem regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa *Vision 3000* mempersyaratkan keterbukaan Korea Utara terhadap reformasi ekonomi dan investasi asing.<sup>145</sup> Namun, seperti pendekatan sebelumnya, kebijakan *Vision 3000* masih bergantung pada asumsi bahwa Korea Utara secara sukarela akan mengubah sistem politik dan ekonominya, termasuk meninggalkan ideologi *songun jeongchi*<sup>146</sup>. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah penyatuan damai berdasarkan sistem republik demokratis liberal, melalui perluasan kerja sama ekonomi antar-Korea yang berujung pada integrasi politik. Hal ini mencerminkan kesinambungan pendekatan nilai (*value-oriented approach*) yang juga dianut pemerintahan sebelumnya, menandakan adanya kebiasaan institusional di kalangan pembuat kebijakan unifikasi, khususnya di Kementerian Unifikasi.<sup>147</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Lee Myung-bak cenderung menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan antar-Korea. Meski mengajukan inisiatif dialog dan kerja sama ekonomi, sikap tegas Lee terhadap

---

<sup>145</sup> Dylan Alexander Stent. *Loc. Cit.* hal.152

<sup>146</sup> Ideologi *songun jeongchi* (politik yang mengutamakan militer, atau yang sering dibilang *militarry first*. Biasanya disebut sebagai *songun* dalam teks bahasa Inggris. Baca lebih lanjut, B. R. Myers. 2015. *North Korea's Juche Myth*. Busan: Sthele Press.

<sup>147</sup> *Ibid.*

denuklirisasi dan penolakan melanjutkan kebijakan *Sunshine Policy* membuat hubungan menjadi lebih kaku dan penuh ketidakpastian. Selain itu, ketergantungan terhadap aliansi Amerika Serikat dan Jepang juga memperburuk situasi meskipun lebih menguntungkan Korea Selatan. Dengan demikian, pemerintahan Lee lebih menekankan pendekatan yang mengedepankan keamanan dan syarat denuklirisasi daripada rekonsiliasi tanpa syarat, sehingga pada akhirnya memperpanjang periode ketegangan dalam hubungan kedua Korea.

### **2.2.6 Era Pemerintahan Park Geun Hye (2013-2017)**

Pada Februari 2013, terjadi pergantian pemerintahan di Korea Selatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Korea Selatan dipimpin oleh seorang presiden perempuan, yakni Park Geun-hye, putri dari Presiden ke-3 Korea Selatan Park Chung-hee, menjadi presiden perempuan pertama Republik Korea setelah terpilih pada 2013 dari partai konservatif Saenuri, presiden Park berhasil memenangkan pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 19 Desember 2012, dengan mengalahkan rivalnya, Moon Jae-in dari Partai Demokrat Bersatu, yang kemudian menggantikan presiden Lee Myung-bak sebagai Presiden Republik Korea.<sup>148</sup> Masyarakat dan komunitas internasional menaruh harapan agar Presiden Park dapat menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea dengan pendekatan yang damai namun tetap tegas.

Tujuan kebijakan luar negeri pemerintahan Park Geun-hye berfokus pada upaya mewujudkan Semenanjung Korea yang baru, di mana reunifikasi dapat

---

<sup>148</sup> KOMPAS. 2012. *Park Geun Hye Presiden Korsel*. Diakses pada 20 Mei 2025, pukul 06:11 wib, dalam <https://otomotif.kompas.com/read/2012/12/20/03484152/park-geun-hye-presiden-korsel?page=all>

tercapai secara “bahagia.” Kebijakan inti untuk tujuan ini adalah normalisasi hubungan antar-Korea melalui *Korean Peninsula Trust-Building Process* atau yang lebih dikenal sebagai *Trustpolitik policy*. Kebijakan ini merupakan hasil perumusan jangka panjang oleh Presiden Park bersama tim keamanan nasionalnya.<sup>149</sup> Pemerintahan baru di bawah Presiden Park Geun-hye mengusung visi administratif berupa "*happiness of the people and a new era of hope*" melalui lima tujuan utama, yaitu: ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, sistem ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang disesuaikan, pendidikan dan budaya yang inovatif, keamanan sosial dan integrasi, serta pembangunan fondasi era reunifikasi yang sejahtera. Pemerintahan ini bertujuan membuka era baru yang penuh harapan, dimana setiap individu dapat merasakan kebahagiaan. Dalam hal ini, kepercayaan publik atau *Trust Net* menjadi infrastruktur tak berwujud namun esensial untuk menjadikan Korea Selatan sebagai negara maju.<sup>150</sup> Kebijakan *trustpolitik* bersandar pada tiga pilar yaitu: penggetar/pertahanan yang kuat (*strong deterrence/defence*), diplomasi kepercayaan (*trust diplomacy*), dan proses membangun kepercayaan di wilayah Semenanjung Korea (*Korean peninsula trust process*).<sup>151</sup> Presiden Park Geun-hye menekankan bahwa *Korean Peninsula Trust-Building Process* bukanlah kebijakan *appeasement*, melainkan strategi berbasis pencegahan kuat terhadap provokasi Korea Utara, khususnya pasca uji coba nuklir ketiga pada 12 Februari 2013. Selain memperkuat pertahanan, strategi ini bertujuan membangun

---

<sup>149</sup> Geun-hye, P. (2011). A New Kind of Korea: Building Trust Between Seoul and Pyongyang. *Foreign Affairs*, 90(5), hal.14. <http://www.jstor.org/stable/23041772>

<sup>150</sup> Cheon, S. (2013). Trust - The Underlying Philosophy of The Park Geun Hye Administration. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.

<sup>151</sup> *Ibid.*

perdamaian berkelanjutan melalui kepercayaan dan normalisasi hubungan antar-Korea. Untuk itu, saluran komunikasi yang sempat terputus di era Lee Myung-bak diupayakan diaktifkan kembali, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perjanjian antar-Korea yang telah ada.<sup>152</sup>

Selama satu tahun masa pemerintahan Park Geun-hye (Februari 2013–Februari 2014), kebijakan *trust-building* diterima secara positif karena dianggap sebagai pendekatan yang realistis dan seimbang dalam mengatasi tantangan hubungan antar-Korea. Kebijakan ini dipandang mampu membawa Semenanjung Korea menuju era baru yang lebih stabil. Dukungan terhadap pendekatan ini datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh global seperti Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, yang memberikan apresiasi terhadap niat baik Korea Selatan.<sup>153</sup> Jika pada masa pemerintahan Lee Myung-bak hanya terdapat delapan pertemuan dan satu kesepakatan pada tahun 2010 serta satu pertemuan di tahun 2011, maka selama tahun pertama pemerintahan Park telah tercatat 27 pertemuan antar-Korea dengan 10 kesepakatan yang berhasil ditandatangani. Kesepakatan tersebut mencakup tujuh perjanjian terkait normalisasi Kompleks Industri Gaeseong, dua kesepakatan dalam pertemuan Palang Merah antar-Korea, serta satu pernyataan bersama dari pertemuan tingkat tinggi.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Lee, N.-Y. (2008). *Vision and policy direction of the Park Geun-hye administration and its East Asia diplomacy*. International Journal of Korean Studies, 12(1), hal.70. Diakses pada <https://core.ac.uk/download/pdf/292915526.pdf>

<sup>153</sup> Yun Byung-se. 2013. [Contribution] President Park Geun-hye's Trustpolitik, (diakses pada 20 Mei 2025). Dalam <http://www.korea.net/NewsFocus/Policies/>

<sup>154</sup> Ministry of Unification. (2014). *2014 White Paper on Korean Unification*. Seoul: Ministry of Unification. Diakses dalam <http://www.unikorea.go.kr>

Presiden Park Geun-hye diperkirakan akan melanjutkan sebagian besar kebijakan pendahulunya, Lee Myung-bak, khususnya dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Ia mendukung implementasi lanjutan dari Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan-AS (KORUS FTA), termasuk menyelesaikan isu *investor-state dispute* (ISD) melalui mekanisme koordinasi yang telah ada. Park juga berkomitmen untuk mempertahankan kerja sama militer yang erat dengan AS dan mendukung rencana transfer kendali operasional perang (OPCON) kepada militer Korea Selatan pada 2015, selama tidak melemahkan postur pertahanan nasional. Selain itu, Park menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan global Amerika Serikat dalam isu-isu seperti perubahan iklim, terorisme internasional, dan pemulihan ekonomi pasca krisis global 2008.<sup>155</sup> Ia juga akan memanfaatkan dukungan AS untuk peran global Korea Selatan, seperti yang dilakukan dalam KTT G20 2010 dan KTT Keamanan Nuklir 2012. Namun, Park juga akan menghadapi isu-isu sensitif dalam hubungan Korea-AS, seperti negosiasi anggaran *host-nation support* untuk pasukan AS dan perjanjian kerja sama nuklir bilateral. Meski tetap menekankan pentingnya aliansi, ia akan mengutamakan kepentingan ekonomi Korea Selatan dalam perundingan tersebut. Di sisi lain, presiden Park ingin membedakan pemerintahannya dari presiden Lee melalui pendekatan yang lebih seimbang terhadap Tiongkok dan Korea Utara. Menyadari memburuknya hubungan ROK-Tiongkok di masa Presiden Lee, Presiden Park berupaya memperkuat kemitraan dengan Tiongkok tanpa mengurangi aliansi

---

<sup>155</sup> Council on Foreign Relations. (2015). *The Park Geun-hye Presidency and the Future of the U.S.-South Korea Alliance*. Diakses pada 20 Mei 2025, pukul 08:00 wib, dalam <https://www.cfr.org/report/park-geun-hye-presidency-and-future-us-south-korea-alliance>

strategis dengan Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa Korea Selatan tidak perlu memilih antara dua kekuatan besar tersebut, melainkan bisa menjalin hubungan baik dengan keduanya secara bersamaan.<sup>156</sup>

Dalam upaya memperkuat keamanan nasional, pemerintahan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun-hye memutuskan untuk menjalin kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui program *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), yaitu sistem pertahanan rudal canggih milik Amerika Serikat yang disepakati untuk ditempatkan di wilayah Korea Selatan. Program ini bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan aset militer Amerika Serikat, dari ancaman nuklir Korea Utara.<sup>157</sup> Penerapan THAAD menunjukkan bahwa pemerintahan Park lebih menekankan pendekatan berbasis kekuatan militer sebagai bentuk perlindungan nasional sekaligus sebagai strategi pencegahan terhadap potensi ancaman eksternal. Selain itu juga, selama masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye, pemerintah Korea Selatan mengembangkan dua sistem pertahanan utama, yaitu *Kill Chain* dan *Korea Air and Missile Defense* (KAMD). Sistem *Kill Chain* dirancang untuk mendeteksi dan merespons serangan misil balistik serta

---

<sup>156</sup> The American Presidency Project. (2014, April 25). *The President's news conference with President Park Geun-hye of South Korea in Seoul, South Korea*. University of California, Santa Barbara. Diakses pada 20 Mei 2025, pukul 07:59 wib, dalam <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/the-presidents-news-conference-with-president-park-geun-hye-south-korea-seoul-south-korea>

<sup>157</sup> Sang-Hun, C. 2017.. South Korea Deploys THAAD, a U.S. Missile Defense System, Angering China. *The New York Times*. Diakses pada 20 Mei 2025, pukul 08:05 wib, dalam <https://www.nytimes.com/2017/05/02/world/asia/thaad-north-korea-missile-defense-us.html>

senjata nuklir Korea Utara secara cepat, sebagai bagian dari strategi pencegahan.<sup>158</sup>

Namun, pelaksanaan sistem KAMD tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari Amerika Serikat, yang kemudian menawarkan sistem pertahanan misil balistik yang lebih canggih, yaitu *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD).<sup>159</sup>

Keputusan untuk mengadopsi THAAD secara resmi diumumkan pada Februari 2016, menyusul uji coba nuklir keempat Korea Utara pada Januari tahun yang sama.

Pada Juli 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat menyepakati pengembangan THAAD yang ditempatkan di Seongju.<sup>160</sup> Pada tahun 2017, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa sistem THAAD telah resmi beroperasi penuh di wilayah Korea Selatan.<sup>161</sup>

Namun demikian, masa kepresidenan Park Geun-hye tidak dapat diselesaikan secara penuh selama lima tahun. Pada tahun 2017, masyarakat Korea Selatan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pemakzulan Park akibat keterlibatannya dalam skandal korupsi. Presiden Park terbukti menyalahgunakan kekuasaan dengan menerima suap dari sejumlah perusahaan besar, termasuk *Samsung Electronics*. Akibat hal tersebut, parlemen Korea Selatan melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan presiden Park, dan pada Maret 2017, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara resmi memberhentikanannya dari jabatan

---

<sup>158</sup> Kyudok, H. (2016). A South Korean Perspective on Dealing with North Korean Provocations : Challenges and Opportunities. Joint U.S.-Korea Academic Studies.

<sup>159</sup> Sukjoon, Y. (2018). Stopping North Korean Missiles: An Alternative to THAAD. Texas: The Diplomat.

<sup>160</sup> Judson, J. (2016). THAAD to Officially Deploy to South Korea. Virginia: Defense News.

<sup>161</sup> Rinna, A. V. (2018). Russia's Strategic Partnerships with China and South Korea : The Impact of THAAD. *Asia Policy* , 79-99.

presiden. Tak lama kemudian, Park Geun-hye ditangkap dan diproses secara hukum.<sup>162</sup>

### 2.2.7 Era Pemerintahan Moon Jae In (2017-2022)

Pemerintahan baru Presiden Moon Jae-in, pada 17 Juli 2017, mengajukan pembicaraan militer bilateral dengan Korea Utara guna mencegah potensi krisis militer di perbatasan yang rawan konflik.<sup>163</sup> Langkah ini diambil di tengah memburuknya hubungan antar-Korea serta hubungan antara Washington dan Pyongyang, terutama setelah Korea Utara mengklaim telah berhasil menguji teknologi peluncuran senjata nuklir jarak jauh yang mampu menjangkau Samudra Pasifik.<sup>164</sup> Kebijakan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah kepemimpinan Moon, dan menjadi kontras tajam dengan pendekatan keras yang diambil oleh pemerintahan konservatif sebelumnya di bawah Park Geun-hye.<sup>165</sup> Salah satu fokus utamanya adalah menghidupkan kembali dialog dan kerja sama ekonomi antar-Korea sebagai jalan menuju reunifikasi dan denuklirisasi di Semenanjung Korea.<sup>166</sup>

Sebagai mantan pengacara hak asasi manusia dan Kepala Staf Presiden Roh Moo-hyun, Moon terpilih dengan janji untuk menghidupkan kembali elemen-elemen utama dari *Sunshine Policy*. Ia bahkan menunjuk tokoh-tokoh kunci dari

---

<sup>162</sup> BBC News. 2017. *South Korea: What is the row over the impeachment of Park Geun-hye?* (<https://www.bbc.com/news/world-asia-39247940>) diakses pada 20 Mei 2025, pukul 08:21 WIB.

<sup>163</sup> Adam Taylor. 2017. "There are 3 Big Reasons Why South Korea's New President Wants Talks with North Korea," *The Washington Post*.  
<https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/17/there-are-3-big-reasons-south-koreas-new-president-wants-talks-with-north-korea/>

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> S. Nathan Park. 2017. "Moon's Secret Weapon is Sunshine," *Foreign Policy*. ,  
<https://foreignpolicy.com/2017/05/19/moons-secret-weapon-is-sunshine-south-korea-kim-jong-un/>

<sup>166</sup> *Ibid.*

era kebijakan tersebut ke dalam kabinetnya, termasuk Suh Hoon—arsitek dua pertemuan tingkat tinggi antar-Korea—yang diangkat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS).<sup>167</sup>

Presiden Moon Jae-in, seperti para presiden Demokratik pendahulunya, menyadari bahwa mempertahankan sanksi dan sikap militer yang konfrontatif terhadap Korea Utara berisiko memicu tragedi nuklir di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, ia mendorong pendekatan diplomatik yang lebih aktif, tanpa sepenuhnya mengabaikan kebutuhan akan postur militer yang kuat.<sup>168</sup> Berbeda dengan presiden sebelumnya, presiden Moon menekankan bahwa meskipun tekanan dan sanksi tetap diperlukan, jalur perdamaian jangka panjang hanya dapat dicapai melalui dialog.<sup>169</sup> Meski mendapat kritik dari sejumlah pihak bahwa pendekatan ini merupakan bentuk "akomodasi" terhadap rezim Korea Utara, pemerintahan Moon tetap mempertahankan postur militer yang kokoh.<sup>170</sup> Sejak dilantik, Korea Selatan di bawah kepemimpinannya telah melakukan latihan militer bilateral besar-besaran dengan Amerika Serikat, yang melibatkan 7.500 tentara AS dan 50.000 tentara

---

<sup>167</sup> BBC World Service. 2017, "South Korea's Moon Jae-in Sworn in vowing to address North, Diakses dari <https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-39866696>.

<sup>168</sup> Choe Sang-Hun. 2017. "South Korea Elects Moon Jae-in, Who Backs Talks with North, as President," The New York Times. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2017/05/09/world/asia/south-korea-election-president-moon-jae-in.html>.

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Choe Sang-Hun. 2017. "South Korea Faces an Uncomfortable Reality: A Nuclear Neighbour," The New York Times. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2017/08/21/world/asia/south-korea-north-nuclear-weapons.html>.

Korea Selatan. Latihan ini dirancang untuk menghadapi berbagai skenario ancaman, termasuk ancaman konvensional, asimetris, dan nuklir.<sup>171</sup>

Pemerintah era presiden Moon juga mengumumkan pembentukan unit khusus yang dijuluki sebagai *decapitation unit*, yang secara terbuka dinyatakan mampu melakukan serangan lintas batas terhadap kepemimpinan Korea Utara jika diperlukan.<sup>172</sup> Selain itu, Moon juga berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari 2,4% pada era pemerintahan konservatif sebelumnya.<sup>173</sup> Peningkatan anggaran ini mencakup pengembangan tiga program utama pertahanan: sistem *Kill Chain* untuk serangan pre-emptive terhadap peluncuran misil, sistem pertahanan udara dan rudal Korea (*Korea Air and Missile Defense/KAMD*), serta *Korea Massive Punishment and Retaliation* (KMPR) sebagai respons terhadap serangan jarak pendek.<sup>174</sup> Pendekatan yang diambil oleh presiden Moon menunjukkan keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas di Semenanjung Korea. Bahkan, kebijakan Moon menunjukkan respons militer yang lebih konkret dibandingkan dengan pendekatan pasif pemerintahan konservatif Lee Myung-bak, yang hanya mengeluarkan kecaman lisan atas insiden tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada tahun 2010. Presiden Moon awalnya berjanji untuk mengevaluasi kembali instalasi sistem THAAD karena penolakan publik dan

---

<sup>171</sup> Choe Sang-Hun. 2017. "South Korea Plans 'Decapitation Unit' to Try to Scare North's Leaders," The New York Times. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/north-south-korea-decapitation-.html>.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

protes dari Tiongkok. Namun, setelah uji coba rudal ICBM oleh Korea Utara pada Juli 2017 dan uji bom hidrogen pada September, Presiden Moon akhirnya menyetujui penyelesaian penuh instalasi THAAD. Ia juga memastikan transparansi proses untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat, yang kemudian meningkatkan dukungan publik terhadap sistem ini (dari 53% ke 72%).<sup>175</sup> Korea Selatan juga aktif melakukan *soft diplomacy* dengan bertukar budaya antar kedua negara. Hubungan tersebut mengarah ke arah yang lebih positif ketika Moon Jae in diundang oleh Kim Jong Un ke Korea Utara dan hal tersebut merupakan kunjungan pertama kali Presiden Korea Selatan ke Korea Utara setelah lebih dari satu dekade yang lalu kedua negara melakukan pertemuan secara bilateral.<sup>176</sup> Hingga pada akhirnya pencapaian Moon Jae In yang signifikan dalam menciptakan normalisasi hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara melalui Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2018, kedua negara sepakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang konfrontatif antar satu sama lain yang berimplikasi pada terganggunya keamanan di Semenanjung Korea dan akan berupaya untuk membuka era baru yang lebih damai dalam meningkatkan normalisasi hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara yang lebih aktif.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup>Richardson, L. (2018). *Shifts in ROK approaches to the DPRK under President Moon*. Australian Strategic Policy Institute. hal.3. <http://www.jstor.org/stable/resrep23018>

<sup>176</sup>Moreno, L. M. V. (2021). Sports Diplomacy and International Relations: A case study for the Winter Olympic Games of Pyeongchang 2018 and the Public relations between North Korea and South Korea

<sup>177</sup>Arjlia, A. (2019). KEPENTINGAN KOREA SELATAN DALAM DEKLARASI PANMUNJOM PADA ASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

### 2.2.8 Era Pemerintahan Yoon Suk Yeol (2022)

Pemerintah Korea Selatan di era presiden Yoon Suk Yeol secara tegas membuktikan bahwa pemerintah Korea Selatan menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya terutama mencapai perdamaian kedua negara Korea melalui revitalisasi *Three Axis Defense System*.<sup>178</sup> Melalui Kementerian Pertahanan Korea Selatan tahun 2022, Korea Selatan juga akan memulai pembentukan "komando strategis" atau *strategic command* pada tahun 2024 untuk memperbaharui *Three Axis Defense System*.<sup>179</sup> Revitalisasi *Three Axis Defense System* Korea Selatan di tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknologi dan kapabilitas pertahanan dari beberapa tahun sebelumnya yaitu tahun 2016.<sup>180</sup> Strategi *Three Axis Defense System* Korea Selatan akan direvitalisasi *Three Axis Defense System* dengan memperbarui sistem tersebut dengan teknologi berbasis *Artificial Intelligent*, dan menambah departemen intelijen, pengawasan, dan pengintaian militer dengan kemampuan yang independen<sup>181</sup>. Serta mencakup pertemuan Korea Selatan dan Amerika Serikat di sebuah forum konsultatif *Extended Deterrence Strategy Consultation Group* (EDSCG) dengan tujuan memperkuat serta mengoordinasikan strategi pencegahan yang diperluas (*extended deterrence*)<sup>182</sup>

---

<sup>178</sup>Ministry of National Defense of the Republic of Korea. (2022). *Defense White Paper 2022*. Retrieved from Ministry of National Defense.

<sup>179</sup>S. Korea to Create 'Three-Axis' Defense System Strategic Command. The Defense Post. July 2022.

<sup>180</sup> Park, S. (2022, November 22). South Korea's three-axis defense system: A shield against North Korean threats. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com>

<sup>181</sup>RYU, Y. (2023). *South Korea in 2022: Aspiring to Become a Global Pivotal State?* East Asian Policy, 15(01), 7–21. <https://doi.org/10.1142/S1793930523000016>

<sup>182</sup>*Extended Deterrence* dapat dikatakan sebagai sebuah strategi pertahanan yang memiliki tujuan untuk mempertimbangkan posisi sekutu atau aliansi sebagai elemen penting kekuatan suatu negara untuk menundukan negara lain agar tidak membawa ancaman bagi sekutu suatu negara. Baca lebih lanjut, Lukman, N., Mardialina, M., & Rizki, K. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan

terhadap ancaman dari Korea Utara, terutama yang berkaitan dengan senjata nuklir dan rudal balistik, dan menyoroti pentingnya kerjasama dari kedua negara.<sup>183</sup>

Pemerintahan Yoon memprioritaskan penguatan postur pencegahan sebagai respons terhadap tantangan keamanan yang dihadapi oleh Korea Selatan. Pendekatan ini menekankan bahwa selain membangun militer yang lebih tangguh, diperlukan ‘sinyal aktif’ dalam kemampuan pertahanan untuk melawan persepsi baru yang mungkin dimiliki oleh Korea Utara. Dalam lingkungan keamanan dan geopolitik baru ini, pemerintah Korea Selatan dan AS akan lebih fokus membangun pencegahan yang lebih kuat untuk mencegah perang daripada membangun rezim perdamaian di semenanjung. Strategi keamanan Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menyerukan penguatan postur pertahanan gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat, kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat terus ditingkatkan untuk mengintegrasikan kemampuan konvensional dan nuklir dalam *Three Axis Defense System*. Amerika Serikat terus mendukung pengembangan dan pengoperasian sistem ini dengan menyediakan intelijen, dan pengintaian di pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Korea Selatan.<sup>184</sup> Kemudian, sistem pertahanan *Three-Axis Defense System* tahun 2022 di Korea Selatan telah mengalami beberapa pembaharuan dan pengembangan untuk meningkatkan

---

Extended Deterrence Dalam Aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Di Asia Timur. In IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse (Vol. 2).

<sup>183</sup> U.S. Department of State. (2022, September 16). *Joint statement on Extended Deterrence Strategy Consultation Group*. Retrieved from <https://www.state.gov/joint-statement-on-extended-deterrence-and-consultation-group/>

<sup>184</sup> Revere, E. J. (2022). *The Future of U.S.-South Korea Military Alliance*. Brookings Institution. Diakses dari <https://www.brookings.edu> , diakses pada 29 Juli 2024.

kemampuan *Three Axis Defense System* dan respons terhadap ancaman nuklir dan rudal dari Korea Utara. Berikut adalah beberapa pembaharuan yang signifikan :

1. Pertama, struktur unit akan dikembangkan kembali untuk memperkuat kemampuan TADS Korea Selatan. Dengan pembentukan unit 'Komando Strategis' Korea Selatan akan dibentuk untuk merespons secara efektif terhadap ancaman nuklir dan rudal yang terus dimunculkan oleh Korea Utara. Komando ini akan mengintegrasikan aset militer dari semua cabang militer Korea Selatan, termasuk F-35A, satelit pengintai, *interceptor* rudal, dan rudal balistik.

2. Kedua, Kemampuan *Kill Chain* sistem ofensif yang dengan cepat dan tepat mendeteksi target utama yang akan ditingkatkan melalui pengenalan pesawat tempur siluman berkinerja tinggi, kapal selam kelas 3.000 ton yang dilengkapi dengan SLBM, dan rudal balistik dari kapal ke hingga ke permukaan sasaran. Militer Korea Selatan akan memperkuat postur *Kill Chain* untuk secara proaktif mendeteksi dan menghancurkan rudal nuklir sebelum dilepas atau diluncurkan, dengan mendapatkan sinyal melalui satelit berteknologi ISR, dan serangan presisi tinggi yang dapat mencapai serangan yang cepat dan akurat terhadap target rudal ancaman yang jelas.

3. Ketiga, yaitu *Korean Air and Missile Defense* (KAMD), sistem ini menyediakan pertahanan berlapis yang terdiri dari beberapa komponen. KAMD terdiri dari sistem intersepsi yang terhubung ke sistem serangan waktu nyata, sistem peringatan dini, serta komando dan kendali. Komponen utama KAMD adalah rudal THAAD, Patriot, M, dan L SAM. Sistem

THAAD memerangi ancaman di ketinggian sedang hingga tinggi (40 hingga 150 kilometer). Untuk melengkapinya, L-SAM akan dikerahkan dengan ketinggian target 40 hingga 70 kilometer. M-SAM-II dan sistem Patriot asal Amerika Serikat (PAC-3) akan memberikan perlindungan spektrum yang lebih rendah.<sup>185</sup>

4. Keempat, sistem *Korea Massive Punishment and Retaliation* (KMPR) akan diperkuat dengan mengembangkan rudal serang super presisi berkekuatan tinggi dan meningkatkan kapasitas infiltrasi melalui serangan pasukan khusus (Tentara Angkatan Bersenjata Korea Selatan). Sistem ini Selain itu, mengintegrasikan melalui "Komando Strategis" yang akan dibentuk pada tahun 2024, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi struktur komando militer Korea Selatan.

Untuk melawan ancaman nuklir Korea Utara, pemerintahan Yoon juga telah mempercepat rencana untuk mengembangkan sistem TADS, seperti satelit pengintaian militer, pesawat tempur F-35A yang dapat menghindari radar, rudal *Patriot Advanced Capability-3*, dan bom penembus bumi GBU-28, yang memperkuat sistem *Three Axis Defense System*.<sup>186</sup>

Latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan, akan bersifat 'dinormalkan', di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol, Korea Selatan memulai penguatan strategis postur pertahanannya melalui perluasan latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat (AS) dan revitalisasi 'Extended

---

<sup>185</sup>Ministry of National Defense of the Republic of Korea. (2022). *Defense White Paper 2022*.

<sup>186</sup>Lee, C. M. 2022. *Shoring Up South Korea's National Security Apparatus*. Carnegie Endowment for International Peace.

*Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG)*'. Singkatnya, perluasan latihan militer gabungan Korea Selatan-A.S, dan revitalisasi EDSCG pada tahun 2022 di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol menandai pergeseran yang menentukan menuju strategi pertahanan yang lebih kuat dan terintegrasi. Langkah-langkah ini menggarisbawahi kekuatan abadi aliansi Korea Selatan-A.S. dan peran pentingnya dalam menjaga keamanan regional.<sup>187</sup>

**Tabel 2.2 Perbandingan Three Axis Defense System di Era Park Geun Hye dan Era Yoon Suk Yeol**

Aspek	Era Park Geun-hye (2013-2017)	Era Yoon Suk-yeol (2022-Sekarang)
Prinsip Inti	<i>Deterrence by Punishment</i> (Penangkal Hukuman). Fokus pada ancaman pembalasan masif jika diserang.	<i>Deterrence by Denial</i> (Penangkal melalui Pencegahan). Fokus pada mencegah serangan terjadi sama sekali.
Prioritas Utama	Mengembangkan dan memperkenalkan 3 komponen TADS (Kill Chain, KAMD, KMPR) sebagai konsep dasar.	Meningkatkan dan Memperkuat secara agresif, terutama <i>Kill Chain</i> untuk kemampuan serangan pre-emptif yang lebih nyata.
Hubungan dengan AS	Kerja sama aliansi.	Latihan gabungan lebih intens dan nyata.
<i>Kill Chain</i>	Konsep awal, masih terbatas kemampuannya untuk melakukan serangan pre-emptif yang andal.	Diperkuat secara signifikan dengan intelijen real-time dari AS, drone canggih, dan doktrin serangan pre-emptif yang lebih jelas.

<sup>187</sup>Smith, R. (2022). Enhancing military readiness: The expansion of ROK-U.S. joint exercises. *Asian Security Studies*, 20(1), 89-105.

KAMD	Fokus pada pertahanan lapis rendah dan menengah (M-SAM, PAC-3).	Fokus pada integrasi dengan sistem AS (THAAD, Aegis) untuk membentuk perisai yang lebih kuat dan berlapis.
KMPR	Ditekankan sebagai komponen utama (Pembalasan Massal).	Dinamai ulang menjadi "Operasi Pembalasan yang Luar Biasa" untuk menekankan respons yang lebih cepat, tepat sasaran, dan mematikan.
Postur Umum	Lebih defensif dan reaktif, menunggu serangan dulu lalu membalas.	Sangat ofensif dan proaktif, dengan doktrin untuk menyerang lebih dulu jika ancaman serangan nuklir dari Korut terdeteksi.

Kesimpulannya, jika dibandingkan dari Era Presiden Park Geun Hye, dimana di era Presiden Park Geun Hye merupakan pengenalan dan peletakan dasar konsep TADS sebagai respon terhadap ancaman Korea Utara. Kebijakannya masih dalam tahap pengembangan. Berbeda dengan Era Presiden Yoon Suk Yeol yang direvitalisasi dan lebih dikembangkan hingga kepada tahap penguatan dan implementasi agresif dari TADS. Kebijakannya lebih terintegrasi penuh dengan Amerika Serikat untuk menangkal serangan dari Korea Utara, selain itu lebih diperluas pula teknologi yang digunakan.

Kemudian, penulis juga membandingkan perbedaan kebijakan dari setiap presiden yang menjabat di Korea Selatan.

**Tabel 2.3 Perbedaan Kebijakan Presiden Korea Selatan (1988 - 2022)**

Presiden	Periode	Kebijakan terhadap Korea Utara	Respons terhadap Uji Coba Nuklir, Rudal, Ketegangan di	Three Axis Defense System (TADS)	Catatan Perbedaan
----------	---------	--------------------------------	--	----------------------------------	-------------------

			Semenanjung Korea		
Syngman Rhee	1948–1960	Ideologi anti-komunis keras, kebijakan <i>Pukch'in t'ongil</i> ( <i>March North for Unification</i> ) unifikasi lewat kekuatan militer, dan menolak koeksistensi damai dengan Korea Utara.	Fokus pada ancaman komunis langsung (pasca Perang Korea), respon konflik lebih pada militerisasi penuh dan menolak negosiasi, tidak ada isu uji coba nuklir/rudal Korea Utara saat periode ini (program nuklir Korea Utara baru berkembang di 1980-an).	-	Menekankan reunifikasi lewat militer dan anti-komunisme total.
Park Chung-hee	1961–1979	Fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi (Saemaul Undong) dan mencetuskan Reunifikasi antar Semenanjung Korea.	Membentuk Ministry of Unification (1969) sebagai saluran resmi dialog. Namun, belum ada uji coba nuklir Korut.	-	Tetap anti-komunis, tapi mulai ada dialog resmi & upaya institusionalisasi reunifikasi.

Roh Tae-woo	1988–1993	<p><i>Nordpolitik</i> dengan membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet (1990) dan Tiongkok (1992). Ia mengajukan inisiatif perdamaian, yang melahirkan <i>Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula</i> (1991). Sebagai tindak lanjut, latihan militer gabungan <i>Team Spirit</i> dihentikan (1992), sementara Korea Utara merespons dengan meratifikasi NPT dan menandatangani <i>safeguard agreement</i> dengan IAEA.</p>	<p>Belum ada uji coba nuklir, namun menghadapi isu kecurigaan fasilitas nuklir Yongbyon. Merespons dengan dialog dan diplomasi multilateral bersama AS &amp; IAEA. Berperan dalam meredakan ketegangan melalui <i>Basic Agreement</i> 1991 dan <i>Joint Declaration on Denuclearization</i> 1992.</p>	-	<p>Fokus pada denuklirisasi, dialog &amp; kerja sama regional maupun multilateral.</p>
-------------	-----------	--	---	---	--

Kim Young-sam	1993–1998	<i>Coercive-realistic absorption &amp; annexation policy.</i> Menekan Korea Utara agar runtuh, berharap reunifikasi lewat keruntuhan rezim.	Menghadapi krisis nuklir pertama (1993–1994); menolak opsi serangan militer AS ke Yongbyon; sedikit menentang <i>Agreed Framework 1994</i> yang dinegosiasikan tanpa peran dominan Seoul.	-	Lebih konfrontatif, berupaya menekan Korea Utara agar kolaps, namun dipinggirkan dalam diplomasi utama.
Kim Dae-jung	1998–2003	<i>Sunshine Policy</i> : rekonsiliasi, kerja sama ekonomi (Kaesong, Mount Kumgang) , memisahkan isu politik-militer dengan hubungan ekonomi.	Meski ada uji coba rudal Taepodong 1998 dan insiden kapal selam, kebijakan <i>Sunshine Policy</i> tetap dilanjutkan. Termasuk dilaksanakannya KTT antar-Korea 2000 ( <i>June 15 Joint Declaration</i> ).	-	Fokus pada rekonsiliasi dan <i>engagement policy</i> , kooperatif & kompromis.
Roh Moo-hyun	2003–2008	<i>Peace and Prosperity Policy</i> kelanjutan dari <i>Sunshine Policy</i> , menekankan dialog dan pembangunan kepercayaan;	Menghadapi uji coba nuklir pertama Korut (2006); dan merespon dengan tetap melanjutkan kebijakan meski ada eskalasi.	Konsep TADS mulai muncul dalam wacana modernisasi militer, tetapi fokus masih pada <i>US-ROK</i>	Lebih menekankan <i>multilateralism</i> (Six Party Talks) dan <i>peace regime</i> ; tetap melanjutkan <i>engagement</i> walau menghadapi uji coba

		mendukung <i>Six Party Talks</i> .		<i>alliance</i> dan <i>Six Party Talks</i> .	nuklir pertama.
Lee Myung-bak	2008–2013	<i>Vision 3000: Denuclearization and Openness</i> → bantuan ekonomi dikaitkan langsung dengan denuklirisasi; lebih keras terhadap pelanggaran HAM Korut.	Menghentikan pendekatan tanpa syarat; membalas provokasi (Cheonan 2010, Yeonpyeong 2010) dengan kebijakan militer yang lebih keras; menolak dialog tanpa denuklirisasi.	TADS ( <i>Kill Chain, KAMD, KMPR</i> ) mulai dipromosikan sebagai strategi keamanan terintegrasi untuk melawan ancaman nuklir-rudal Korut, di samping aliansi ROK–AS–Jepang.	Pergeseran signifikan ke pendekatan <i>conditional engagement</i> dengan syarat denuklirisasi; berbeda tajam dengan <i>Sunshine Policy</i> dan lebih militeristik.
Park Geun-hye	2013–2017	<i>Trustpolitik Policy</i> (Korean Peninsula Trust-Building Process), menekankan <i>deterrence</i> kuat, diplomasi berbasis kepercayaan, dan normalisasi	Menyikapi uji coba nuklir ke-3 (Februari 2013) dengan memperkuat pertahanan dan memperdalam aliansi militer dengan AS. Memutuskan penerapan sistem pertahanan THAAD (2016) sebagai respons terhadap uji coba	Mengembangkan <i>Kill Chain &amp; KAMD</i> . TADS belum direvitalisasi, tetapi dasar dari sistem pertahanan TADS mulai diranca	Menekankan <i>deterrence</i> keras namun tetap membuka ruang dialog; fokus pada <i>trust-building</i> dan aliansi dengan AS, sambil mencoba menjaga keseimbangan

		i hubungan antar-Korea.	nuklir ke-4 Korea Utara.	g melalui <i>Kill Chain</i> dan KAMD.	an hubungan dengan Tiongkok.
Moon Jae-in	2017–2022	Menghidupkan kembali elemen <i>Sunshine Policy</i> , fokus pada diplomasi, dialog, dan kerja sama ekonomi serta pertukaran budaya sebagai jalan menuju denuklirasi dan reunifikasi.	Awalnya kritis terhadap THAAD namun akhirnya mendukung penuh pasca uji coba ICBM dan bom hidrogen (2017). Mendorong diplomasi melalui KTT antar-Korea (Deklarasi Panmunjom 2018). Tetap memperkuat militer dengan latihan besar bersama AS.	Melanjutkan pengembangan <i>Kill Chain</i> , KAMD, dan menambah KMPR (Korea Massive Punishment and Retaliation). Tidak menekankan revitalisasi TADS, tetapi fokus pada kombinasi diplomasi dan <i>deterrence militer</i> .	Lebih menekankan <i>diplomatic engagement</i> dan <i>soft diplomacy</i> , namun tetap realistis dengan penguatan militer, serta menekankan rekonsiliasi politik antar-Korea.
Yoon Suk-yeol	2022	Pendekatan keras dan konfrontatif terhadap Korea Utara, menekankan keamanan	Menanggapi lonjakan rekor uji coba rudal Korea Utara (lebih dari 70 kali pada 2022) dengan revitalisasi TADS. Memperkuat	Merevitalisasi <i>Three Axis Defense System (Kill Chain, KAMD, KMPR)</i>	Paling menekankan <i>hard deterrence</i> berbasis teknologi modern dan revitalisasi penuh TADS,

		nasional dan aliansi dengan AS.	kerja sama dengan AS melalui forum EDSCG ( <i>Extended Deterrence Strategy Consultation Group</i> ).	dengan pembaruan teknologi berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dan penguatan komando strategis (2024).	sepenuhnya mengedepankan respons militer dan pencegahan agresi.
--	--	---------------------------------	--	--	---

(Sumber : Diolah dari berbagai sumber)

### 2.3 Posisi Tiongkok Terhadap Korea Utara dalam Perspektif Korea

#### Selatan

Kerjasama antara Tiongkok dan Korea Utara telah berlangsung selama beberapa dekade dan ditandai dengan hubungan yang kompleks, di mana Tiongkok berfungsi sebagai pelindung utama Korea Utara. Hubungan ini berakar pada sejarah yang panjang dan saling ketergantungan, serta dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Timur.

Tiongkok berusaha mempertahankan Korea Utara, baik dalam kondisi perang dan non-perang, setidaknya sudah dibuktikan dalam keterlibatan Tiongkok pada Perang Korea 1950-1953. Dalam konflik di Semenanjung Korea, Tiongkok berusaha untuk mempertahankan wilayah Korea Utara. Apabila melihat dari sisi historis, keterlibatan Tiongkok dalam wilayah Korea Utara sudah berlangsung sangat lama, bahkan sudah mulai pada Kekaisaran China. Keterlibatan Tiongkok dimulai pada saat Perang Korea, kala itu Tiongkok membantu pasukan Korea Utara dalam konflik yang terjadi pada tahun 1950, keterlibatan Tiongkok terjadi hingga

sekarang pada berbagai forum internasional.<sup>188</sup> Dalam forum internasional, Tiongkok juga memihak kepada Korea Utara. Tepatnya pada rapat resolusi PBB pada tahun 2022 terkait dengan sanksi terhadap Korea Utara, Tiongkok telah menggunakan hak vetonya untuk menolak penguatan sanksi baru terhadap Korea Utara, dimana Tiongkok sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.<sup>189</sup> Adanya kesamaan ideologi dan kepentingan, membuat Tiongkok semakin gencar disebut sebagai pelindung Korea Utara.

Selain itu, bagi Tiongkok, Korea Utara berfungsi sebagai *guard post* untuk mengamati pergerakan Amerika Serikat di wilayah perbatasan antara Tiongkok dan Korea.<sup>190</sup> Tiongkok juga membutuhkan Korea Utara sebagai *buffer zone* (zona penyangga) untuk membatasi infiltrasi *liberalism*.<sup>191</sup> Tiongkok memandang Korea Utara sebagai *buffer zone* atau zona penyanggah dari pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur. Secara geografis, Korea Utara berbatasan langsung dengan Tiongkok, sehingga apabila wilayah ini dikuasai oleh Amerika Serikat, maka akan mengganggu stabilitas regional Tiongkok.

Kemudian pada isu pemasangan THAAD di era presiden Moon Jae In, Korea Selatan dan Amerika Serikat bersepakat untuk memasang *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di wilayah Korea Selatan. Sistem THAAD dimaksudkan untuk menangkal nuklir Korea Utara. Namun kesepakatan ini

---

<sup>188</sup> Shen, Z. (2020). *China and Korea: History, diplomacy, and international relations*. Routledge.

<sup>189</sup> CNN. (2022, May 26). *US pushes for UN action after North Korea missile tests*. CNN.  
<https://www.cnn.com/2022/05/26/asia/us-north-korea-united-nations-intl-hnk>

<sup>190</sup> Academia. (n.d.). *Sesuaikan Democratic Peace Dalam Krisis Korea*. Retrieved July 9, 2024, from academia.edu:  
[https://www.academia.edu/6566320/Sesuaikah\\_Democratic\\_Peace\\_dalam\\_Krisis\\_Korea](https://www.academia.edu/6566320/Sesuaikah_Democratic_Peace_dalam_Krisis_Korea)

<sup>191</sup> Nam, C., 2010. *Beijing and The 1961 PRC-DPRK Security Treaty*. s.l.:s.n.

penolakan dari Tiongkok yang menilai sistem tersebut dapat mengganggu kedaulatannya. THAAD merupakan ancaman bagi pertahanan Tiongkok, karena THAAD berhubungan dengan rudal balistik Tiongkok yang sebenarnya ditunjukkan untuk Amerika Serikat. Adanya sistem pertahanan rudal berbasis darat di Korea Selatan dapat menguntungkan Amerika Serikat untuk melacak keberadaan rudal balistik milik Tiongkok dan hal ini yang kemudian menjadi ancaman bagi Tiongkok karena bisa mengganggu pertahanan negaranya. Sejak saat itu, hubungan Korea Selatan dan Tiongkok memanas dan muncul berbagai berita mengenai boikot. Boikot menyerang klaster industri budaya Korea Selatan di Tiongkok. Sehingga Korea Selatan harus berdialog untuk menghentikan kebijakan pengerasan THAAD nya.<sup>192</sup>

Terkait dengan posisi Tiongkok dari perspektif Korea Selatan, dukungan Tiongkok terhadap Korea Utara dapat memperumit upaya-upaya internasional untuk mencapai penyelesaian damai terhadap isu-isu keamanan dan nuklir. Hal yang menonjol dari persepsi Korea Selatan tentang Tiongkok adalah bahwa Tiongkok tidak hanya dilihat sebagai ancaman militer dan ekonomi yang terus meningkat, tetapi juga sebagai tempat yang memanfaatkan imperialisme budaya. Dari perspektif Korea Selatan pula, Korea Selatan khawatir bahwa Tiongkok akan terus mendukung Korea Utara dalam menghadapi sanksi internasional, yang dapat memperkuat posisi rezim Kim dan menghalangi upaya denuklirisasi.<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Wang, J. (2018). *THAAD and China-South Korea Relations: Strategic and Economic Implications*. Routledge. Routledge

<sup>193</sup> Gi-wook Shin, Haley Gordon, and Hannah June Kim, "South Koreans Are Thinking What China Means to Their Nation," Stanford University, Freeman Spogli Institute for International Studies, July 8, 2024, <https://fsi.stanford.edu/news/south-koreans-are-rethinking-what-china-means-their-nation>.

Korea Utara tetap menjadi negara yang dilindungi selalu oleh Tiongkok, karena pada logika nya, Tiongkok membutuhkan aliansi. Untuk menyeimbangkan persaingan pengaruh nya terutama di kawasan Asia Timur, dia membutuhkan Korea Utara. Keterlibatan Amerika Serikat dan Tiongkok membuat ketegangan di Semenanjung Korea semakin memanas. Kedua negara besar ini memiliki kepentingan dengan negara yang sedang berkonflik. Tiongkok berusaha mempertahankan eksistensi di Korea Utara untuk menjaga pengaruh di Asia Timur serta mengimbangi posisi terhadap Amerika Serikat.<sup>194</sup>



---

<sup>194</sup> Beeson, M., & Li, F. (2016). *China's Place in Regional and Global Governance: A New World Comes Into View*. *Global Policy*, 7(4), 491–499. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12348>